

PT. ICDE



LAPORAN AKHIR

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN PROFIL GENDER KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat pusat maupun daerah, namun dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal. Kesenjangan gender masih ditemui di berbagai sektor pembangunan. Hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah belum berhasilnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebabkan ketiadaan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang responsif gender.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data statistik berbasis gender. Karenanya, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara cermat dan tepat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Profil Gender di Kota Semarang disusun dengan maksud untuk memberikan informasi data statistik terpilah berbasis gender serta melihat tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Gender di Kota Semarang adalah;

- a. Tersedianya Data Statistik berbasis Gender berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kesetaraan gender di Kota Semarang
- b. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang
- c. Tersedianya analisis kondisi capaian pemberdayaan perempuan di Kota Semarang

D. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah tersusunya Profil Gender Kota Semarang Tahun 2019.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi indikator kinerja berbasis urusan yang terpilah secara jenis kelamin
2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja masing-masing indikator.
3. Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

F. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan.

G. Klasifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

1. Tenaga Ahli

- a. Ahli Kebijakan Publik (Team Leader)
1 (satu) orang sebagai Ketua Tim (Team Leader), berpendidikan **Pasca Sarjana (S2) Kebijakan Publik** dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 tahun.
- b. Ahli Sosial
1 (satu) orang, berpendidikan Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 tahun.

2. Tenaga Pendukung

- a. Tenaga pengolah data
1 (satu) orang dengan pendidikan D-III atau S1 semua jurusan.
- b. Tenaga administrasi
1 (satu) orang dengan pendidikan D-III atau S1 semua jurusan.

H. Kepemilikan Data dan Hasil Kegiatan

Semua bentuk data, dokumen, peta, foto, *softcopy*, yang dipergunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

I. Peralatan, Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang, peralatan minimal yang harus disediakan oleh penyedia jasa yaitu:

1. Satu ruang kantor dengan fasilitas telepon dan listrik;
2. Satu unit kendaraan roda 4 untuk operasional;
3. Dua unit kendaraan roda 2 untuk operasional;
4. Dua set Komputer.

J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang, pelaksana pekerjaan dapat menggunakan fasilitas berupa Surat

Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan data yang diperlukan.

K. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan rencana kerja	■							
2	Penyusunan laporan pendahuluan	■	■						
3	Penyusunan Instrumen Kebutuhan Data		■						
4	Presentasi laporan pendahuluan		■						
5	Pengumpulan data sekunder			■					
6	Pengumpulan data primer			■					
7	Pengolahan data			■	■				
8	Penyajian dan analisis data				■				
12	Penyusunan Draft Laporan Akhir					■	■		
13	Pembahasan Draft Laporan Akhir							■	
14	Revisi Laporan Akhir							■	
15	Penyerahan Laporan Akhir								■

L. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merupakan karakteristik sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, status relasi yang didapat dengan cara belajar yang memiliki sifat beragam dan dinamis sesuai budaya dan status sosial. Terbentuknya stigma perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan oleh karena disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui proses perkembangan pola berfikir masyarakat.

Kesenjangan gender di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender masih terjadi pada berbagai aspek bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal jauh dengan jenjang pendidikan yang di capai laki-laki. Ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi terlihat dari kemiskinan yang dialami oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Maraknya kasus tindak kekerasan serta rendahnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah indikator ketertinggalan perempuan dibidang sosial dan budaya. Sedangkan masih terbatasnya perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan indikasi masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan **strategi** pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Isu strategis pengarusutamaan gender dituangkan dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender juga menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan; dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengupayakan kesetaraan gender. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu ditemukan solusi terkait dengan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol berbagai program pembangunan, terutama pendidikan perempuan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan,

Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, *focal point*, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data statistik berbasis gender. Karenanya, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara cermat dan tepat.

B. Landasan Hukum

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

C. Maksud dan Tujuan

3. Maksud

Penyusunan Profil Gender di Kota Semarang disusun dengan maksud untuk memberikan informasi data statistik terpilah berbasis gender serta melihat tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan

4. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Gender di Kota Semarang adalah;

- d. Tersedianya Data Statistik berbasis Gender berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kesetaraan gender di Kota Semarang
- e. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang
- f. Tersedianya analisis kondisi capaian pemberdayaan perempuan di Kota Semarang

D. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah tersusunya Profil Gender Kota Semarang Tahun 2019.

E. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika laporan akhir Pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah sebagai berikut :

4. Bab I Pendahuluan

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan output pekerjaan Profil Gender dan Anak Kota Semarang.

5. Bab II Gambaran Umum Kota Semarang
Pada bab II menguraikan tentang Kondisi Geografis dan Astronomis, Kondisi Demografis, Kondisi Pembangunan Manusia dan Kondisi Pembangunan Gender Kota Semarang.
6. Bab III Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Pada bab III menguraikan tentang Kajian Teoritis, Kerangka Pikir, Instrumen Pelaksanaan Kegiatan dan Sistematika Laporan Akhir
7. Bab IV Capaian Pembangunan Gender Kota Semarang
Pada bab IV menguraikan tentang Capaian Kinerja Pembangunan Gender Kota Semarang berdasarkan **11 Area Kritis**.
8. Bab V Penutup

BAB III

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Gender

Kata gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "genus", berarti tipe atau jenis. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, dan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi tentang gender yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (Murfitriati dan A. Sopari, 2007)
- b. Gender diartikan sebagai pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat (Khairani Arifin, dkk., 2007)
- c. Gender adalah pembagian sifat, peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat (Esti Ismawati dan Rochaningsih, 2009).
- d. Gender merupakan ciri-ciri, sifat, peran, tanggungjawab dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk (dikonstruksikan) secara sosial. Gender juga disebut sebagai pembedaan jenis kelamin sosial (YAPIKA, 2009).
- e. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Permendagri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah).

Mendasarkan berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal sifat, peran, posisi, tanggungjawab dan fungsi yang terbentuk dari hasil kontruksi sosial. Gender mencakup relasi gender, yaitu hubungan dan cara-cara suatu budaya atau masyarakat yang mengatur hak, peran, dan kewajiban serta identitas perempuan dan laki-laki. Relasi gender ini dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, ideologi, budaya (adat istiadat, tradisi), etnisitas, golongan, politik, sistem ekonomi, faktor sejarah, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gender bisa berubah dalam kurun waktu, konteks wilayah dan budaya tertentu.

Gender berbeda dengan seks. Seks merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada sejak lahir sebagai sesuatu yang alami/kodrati, diciptakan oleh Tuhan, bersifat biologis, mengacu pada perbedaan yang kelihatan pada alat kelamin dan perbedaan dalam hubungan dengan fungsi prokreasi (menghasilkan keturunan). Seks bersifat universal artinya bersifat tetap/tidak berubah sepanjang masa, sama di setiap tempat/wilayah dan budaya. Sementara itu gender bersifat sosial-budaya dan psikologis, dibuat oleh manusia, dan mengacu pada kualitas feminine dan maskulin, pola perilaku, peran, tanggung jawab, dll. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu budaya ke budaya lain, dari satu keluarga ke keluarga lain.

Dalam memahami konsep gender, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu:

a. Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Permendagri 15 tahun 2008). Kesetaraan gender mengacu pada tujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, diantaranya untuk: (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang

publik; (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan (3) Menikmati manfaat partisipasinya.

Saat ini konsep kesetaraan gender mengacu pada upaya memberikan kondisi yang adil bagi perempuan dan memberikan perlakuan yang adil seperti bila mereka pada status yang sama. Kesetaraan gender berarti mengakui perbedaan perempuan dan laki-laki dan perbedaan peran mereka di masyarakat. Oleh karenanya, kesetaraan gender menggarisbawahi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki seharusnya tidak memberi dampak negatif pada kehidupan mereka. Bahkan mereka dapat untuk saling berbagi dan bertukar peran dan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka quota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Permendagri 15 tahun 2008). Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender ini tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga banyak dialami oleh laki-laki.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarustamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri 67 Tahun 2011). Pengarusutamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional

menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan¹. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindak. Pemikiran ini didasari oleh fenomena yang terjadi secara global tentang kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan yaitu masih belum terintegrasikannya pendekatan sensitive gender (masih bias gender) sehingga rentan menimbulkan permasalahan gender dalam implementasinya.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing², adalah:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan,
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan,
- 3) Perempuan dan Kesehatan,
- 4) Kekerasan Terhadap Perempuan,
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata,
- 6) Perempuan dan Ekonomi,
- 7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
- 8) Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
- 9) Hak Asasi Perempuan,

¹Biro perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 27 Mei 2015.

²Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012. 2012.

- 10) Perempuan dan Media,
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
- 12) Anak Perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG kedalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3). Tujuan ketiga MDGs tersebut memiliki target mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Meskipun telah dikumandangkan dalam waktu yang relatif lama, tindak lanjut terhadap pelaksanaan PUG di daerah masih belum memiliki prestasi yang signifikan. Sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, pemerintah daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan PUG di daerah. Pergerakan terhadap pelaksanaan PUG ditunjukkan sejak diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Permendagri 15 Tahun 2008 jo Peremendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG kedalam dokumen perencanaan daerah meliputi, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD.

2. Data Terpilah/Statistik Gender

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data dapat digunakan untuk menilai tentang sebuah kondisi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh data tersebut, tidak terkecuali tentang kondisi pembangunan gender. Kondisi tentang ketimpangan ataupun kesetaraan dan keadilan gender dapat dianalisis dan dinilai melalui sebuah data terpilah atau disebut dengan data gender. Data gender, berdasarkan jenisnya, dapat diklasifikasi kedalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender yang dinominasikan dalam sebuah satuan yang rigid, dihasilkan melalui sebuah formula perhitungan, serta bernominasikan angka disebut dengan data kuantitatif. Adapun data yang bersifat keterangan atau pendapat yang menggambarkan tentang sebuah kondisi ketimpangan atau kesetaraan dan keadilan gender disebut dengan data kualitatif.

Penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Profil Gender yaitu informasi yang mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari Hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan

ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/atau yang sedang dilakukan.

Data pilah berdasarkan fungsinya terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti;
2. Merupakan data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan; dan
3. Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

Data pilah berdasarkan bentuk data dikategorikan kedalam 5 (lima) jenis data, yaitu:

1. Data Makro;
2. Data Agregat;
3. Data Mikro;
4. Data Spesifik; dan
5. Data lain yang bersifat khusus urusan.

3. Instrumen Data Pilah Gender berdasarkan Pembagian Urusan

Instrumen data pilah gender yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

A. Indikator Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH)
 - b. Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - c. Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
 - d. Pengeluaran Per Kapita
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH)
 - b. Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - c. Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
 - d. Pengeluaran Per Kapita
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

- c. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- d. Jumlah Pasien Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan

B. Kesehatan

1. Kematian Ibu Maternal
 - a. Angka Kematian Ibu Melahirkan
 - b. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
 - c. Jumlah Kematian Ibu Hamil
 - d. Jumlah Kematian Ibu Bersalin
 - e. Jumlah Kematian Ibu Nifas
2. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
 - a. Partus lama
 - b. Infeksi
 - c. Hipertensi
 - d. Pendarahan
 - e. Penyebab Lainnya
3. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan
 - a. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan
 - b. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes
4. Pelayanan Ibu Nifas
 - a. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
 - b. Pelayanan Komplikasi Maternal
 - c. Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A
5. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
 - a. Kunjungan K1
 - b. Kunjungan K4
 - c. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil
 - d. Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1)
 - e. Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 3)
6. Tenaga Kesehatan
 - a. Jumlah Dokter
 - b. Jumlah Tanaga Medis
 - c. Jumlah Dokter Umum
 - d. Jumlah Dokter Spesialis Obgin
 - e. Jumlah Dokter Spesialis Anak

- f. Jumlah Dokter Spesialis Anastesi
- g. Jumlah Bidan
- 7. Kasus Aborsi
 - a. Jumlah Kasus Aborsi Pada Remaja Putri
- 8. Penderita HIV/AIDS
 - a. Jumlah Penderita HIV/AIDS
 - b. Jumlah Penderita HIV/AIDS Usia 0-18 Tahun
- 9. Keluarga Berencana
 - a. Total Fertility Rate (TFR)
 - b. Prevalensi Peserta KB Aktif
 - c. Persentase Laki-laki ber KB
 - d. Unmetneed (%)
 - e. Jumlah Peserta KB Baru
 - f. Jumlah Peserta KB Drop Out
 - g. Persentase Keluarga Ikut KB
 - h. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif
 - i. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi IUD
 - j. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOP
 - k. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOW
 - l. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Implant
 - m. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Suntik
 - n. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Pil
 - o. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Kondom
 - p. Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Obat Vagina
 - q. Persentase Peserta KB Baru
 - r. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi IUD
 - s. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOP
 - t. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOW
 - u. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Implant
 - v. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Suntik
 - w. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Pil
 - x. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Kondom
 - y. Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Obat Vagina
- 10. Keluarga Sejahtera

- a. Jumlah Keluarga Pr KS
 - b. Jumlah Keluarga KS I
 - c. Jumlah Keluarga KS II, III Keatas
11. Posyandu
 - a. Jumlah kader Posyandu
 - b. Jumlah Posyandu Pratama
 - c. Jumlah Posyandu Madya
 - d. Jumlah Posyandu Purnama
 - e. Jumlah Posyandu Mandiri
 - f. Jumlah Posyandu Model
 12. Fasilitas Publik Area
 - a. Jumlah Ruang Laktasi Pada Publik Area
 13. Usia perkawinan pertama
 - a. Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama
 14. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
 - a. Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
 - b. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi
 15. Rehabilitasi Kasus Narkotika

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

 - a. Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
 - b. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi
 - c. Jumlah Anak Usia 18 - 55 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi
 - d. Jumlah Anak Usia 55 Tahun ke atas Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi
 16. Pemberantasan Narkotika

Pemberantasan Kasus Narkotika

 - a. Jumlah Kasus Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

- b. Jumlah Barang Bukti Narkotika Tidak Pidana Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

17. Kelembagaan

- a. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu
- b. Jumlah Rumah Sakit Sayang Ibu
- c. Jumlah Gugus Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- d. Jumlah Satgas Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- e. Jumlah Kelompok Suami Antar Jaga

C. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
 - a. APS Usia 7-12 Tahun
 - b. APS Usia 13-15 Tahun
 - c. APS Usia 16-18 Tahun
2. Angka Partisipasi Kasar (APK)
 - a. APK SD Sederajat
 - b. APK SMP Sederajat
 - c. APK SMA Sederajat
3. Angka Partisipasi Murni (APM)
 - a. APM SD Sederajat
 - b. APM SMP Sederajat
 - c. APM SMA Sederajat
4. Angka Putus Sekolah (APtS)
 - a. APtS SD Sederajat
 - b. APtS SMP Sederajat
 - c. APtS SMA Sederajat
5. Angka Kelulusan (AL)
 - a. AL SD Sederajat
 - b. AL SMP Sederajat
 - c. AL SMA Sederajat
6. Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)
 - a. AMS SD Sederajat ke SMP Sederajat
 - b. AMS SMP Sederajat ke SMA Sederajat
7. Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
8. Jumlah Tutor Kejar Paket A, B dan C
9. Pendidikan Kesetaraan
 - a. Jumlah Peserta Paket A

b. Jumlah Peserta Paket B

c. Jumlah Peserta Paket C

D. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Angkatan Kerja
2. Jumlah Angkatan Kerja
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
4. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
5. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
6. Tenaga Kerja di Bawah Umur
7. Jumlah Pekerja Anak Usia 5 - 14 Tahun
8. Jumlah Pekerja Anak Usia 5 Tahun ke Atas
9. Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur
10. Pengangguran
11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
12. Jumlah Penganggur
13. Jumlah Setengah Penganggur
14. Pencari Kerja
15. Jumlah Pencari Kerja
16. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat
17. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat
18. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat
19. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma
20. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3
21. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
22. Angkatan Kerja
23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
24. Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta
25. Jumlah Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)
26. Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)
27. Jumlah Penduduk yang Bekerja
28. Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek (K3)
29. Jumlah Pekerja yang Terkena PHK
30. Jumlah Tenaga Kerja Migran
31. Tenaga Kerja di Bawah Umur
32. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
33. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

34. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
35. Jumlah UMKM yang memiliki ijin
36. Jumlah Koperasi Aktif
37. Jumlah Pengurus Koperasi Aktif
38. Jumlah Anggota Koperasi Aktif
39. Jumlah Koperasi Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan
40. Jaringan Perempuan Usaha Kecil
41. Jumlah JARPUK
42. Jumlah Anggota JARPUK
43. Jumlah Bina Keluarga TKI
44. Jumlah Anggota Bina Keluarga TKI
45. Jumlah IR
46. Jumlah Binaan Ekonomi Perempuan
47. Jumlah Penghuni los pasar
48. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
49. Jumlah P2WKSS

E. Politik dan Pengambilan Keputusan

1. Keterwakilan di Lembaga Legislatif
2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota
3. Pengurus Partai Politik dan Organisasi
4. Jumlah Anggota PKS
5. Jumlah Anggota PDIP
6. Jumlah Anggota PKB
7. Jumlah Anggota GOLKAR
8. Jumlah Anggota NASDEM
9. Jumlah Anggota HANURA
10. Jumlah Anggota GERINDRA
11. Jumlah Anggota DEMOKRAT
12. Anggota Partai Politik dan Organisasi
13. Jumlah Anggota PKS
14. Jumlah Anggota PDIP
15. Jumlah Anggota PKB
16. Jumlah Anggota GOLKAR
17. Jumlah Anggota NASDEM
18. Jumlah Anggota HANURA
19. Jumlah Anggota GERINDRA

20. Jumlah Anggota DEMOKRAT
21. Keterwakilan di Lembaga Yudikatif
22. Jumlah Hakim
23. Jumlah Jaksa
24. Jumlah Polisi
25. Partisipasi Lembaga Eksekutif
26. Jumlah PNS Eselon I
27. Jumlah PNS Eselon II
28. Jumlah PNS Eselon III
29. Jumlah PNS Eselon IV
30. Jumlah PNS Jabatan Guru
31. Jumlah PNS Golongan I
32. Jumlah PNS Golongan II
33. Jumlah PNS Golongan III
34. Jumlah PNS Golongan IV
35. Jumlah PNS (Lulus SD Sederajat)
36. Jumlah PNS (Lulus SMP Sederajat)
37. Jumlah PNS (Lulus SMA Sederajat)
38. Jumlah PNS (Lulus Diploma)
39. Jumlah PNS (Lulus S1/S2/S3)
40. Jumlah Camat
41. Jumlah Lurah
42. Serikat Pekerja
43. Jumlah Anggota Serikat Pekerja

F. Hukum dan Sosial Budaya

1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa
2. Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa
3. Rumah Tahanan (Rutan)
4. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)
5. Penduduk Lanjut Usia
6. Jumlah Lanjut Usia Terlantar
7. Jumlah Penyandang Disabilitas
8. Jumlah Kejadian Bencana
9. Jumlah Korban Bencana Banjir
10. Jumlah Korban Bencana Tanah Longsor
11. Jumlah Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor

12. Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi
13. Jumlah Korban Bencana Angin Puting Beliung
14. Jumlah Korban Bencana Abrasi Pantai
15. Jumlah Korban Bencana Kebakaran Lahan
16. Jumlah Korban Bencana Kebakaran Pemukiman
17. Jumlah Korban Bencana Gelombang Pasang
18. Jumlah Korban Bencana Kekeringan
19. Jumlah Korban Bencana Alam
20. Jumlah Korban Bencana Sosial
21. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
22. Pengarusutamaan Gender dan Anak
23. Jumlah Forum Seni Budaya
24. Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan
25. Jumlah Rumah Aman (Shelter)
26. Jumlah Rumah Singgah
27. Jumlah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
28. Jumlah Panti Asuhan Anak
29. Jumlah Lembaga Pemasarakatan Anak
30. Jumlah Korban Kekerasan Anak (Usia Kurang Dari 18 Tahun)
31. Jumlah Korban Kekerasan Remaja (Usia 18-25 Tahun)
32. Jumlah Korban Kekerasan Desawa (Usia 25 Tahun ke Atas)
33. Pendidikan Korban Kekerasan termasuk TPPO
34. Jumlah Korban Kekerasan Tidak Sekolah
35. Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SD Sederajat
36. Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SMP Sederajat
37. Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SMA Sederajat
38. Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan Diploma
39. Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan S1/S2/S3
40. Status Pekerjaan Korban Kekerasan termasuk TPPO
41. Jumlah Korban Kekerasan Status Bekerja
42. Jumlah Korban Kekerasan Status Pengangguran
43. Jumlah Korban Kekerasan Status Mengurus Rumah Tangga
44. Status Perkawinan Korban Kekerasan termasuk TPPO
45. Jumlah Korban Kekerasan Status Menikah
46. Jumlah Korban Kekerasan Status Cerai (Janda/Duda)
47. Jumlah Korban Kekerasan Status Belum Menikah

48. Jenis Kekerasan Terhadap Korban
49. Jumlah Korban Kekerasan Fisik/KDRT
50. Jumlah Korban Kekerasan Seksual
51. Jumlah Korban Kekerasan Psikis
52. Jumlah Korban Kekerasan Trafficking
53. Jumlah Korban Kekerasan Ekonomi
54. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban Kekerasan termasuk TPPO
55. Pengaduan
56. Medis/Visum
57. Bantuan Hukum
58. Rehabilitasi Sosial
59. Pendampingan
60. Reintegrasi Sosial
61. Pelaku Kekerasan
62. Jumlah Pelaku Kekerasan
63. Pendidikan Pelaku Kekerasan
64. Jumlah Pelaku Kekerasan Tidak Sekolah
65. Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SD Sederajat
66. Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SMP Sederajat
67. Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SMA Sederajat
68. Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan Diploma
69. Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan S1/S2/S3
70. Status Pekerjaan Pelaku Kekerasan
71. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Bekerja
72. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Pengangguran
73. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Mengurus Rumah Tangga
74. Hubungan Pelaku Kekerasan Dengan Korban
75. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Suami/Istri
76. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Keluarga/Kerabat
77. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Tetangga
78. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Pacar
79. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Teman
80. Jumlah Pelaku Kekerasan Status Orang Lain
81. Kebangsaan Pelaku Kekerasan
82. Jumlah Pelaku Lokal

83. Jumlah Pelaku Kebangsaan Asing
84. Forum Anak
85. Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan
86. Forum Anak Tingkat Kecamatan
87. Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota
88. Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
89. Jumlah Kecamatan Layak Anak
90. Jumlah Puskesmas Layak Anak
91. Jumlah Rumah Sakit Layak Anak
92. Jumlah Sekolah SD Layak Anak
93. Jumlah Sekolah SMP Layak Anak
94. PPT/P2TP2A
95. Jumlah Tenaga Medis di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota
96. Jumlah Tenaga Psikologi di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota
97. Jumlah Tenaga Pendampingan Agama di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota
98. Jumlah Konselor di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota
99. Jumlah Advokat di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota
100. Identitas Penduduk
101. Persentase Kepemilikan KTP
102. Persentase Kepemilikan KK
103. Kepemilikan Akta Kelahiran
104. Persentase Anak Usia 0-18 yang Memiliki Akta Kelahiran
105. Persentase Akte Nikah
106. Persentase anak dengan Akta Kelahiran
107. Persentase anak yang memiliki KIA
108. Persentase kepemilikan akta perceraian
109. Infrastruktur
110. Sanitasi
111. Jumlah Sanitasi Layak
112. Pengelola Teknis
113. Jumlah Pengelola Teknis
114. Jalur Difabel
115. Panjang Pedestrian Ramah Difabel
116. Rumah Kumuh

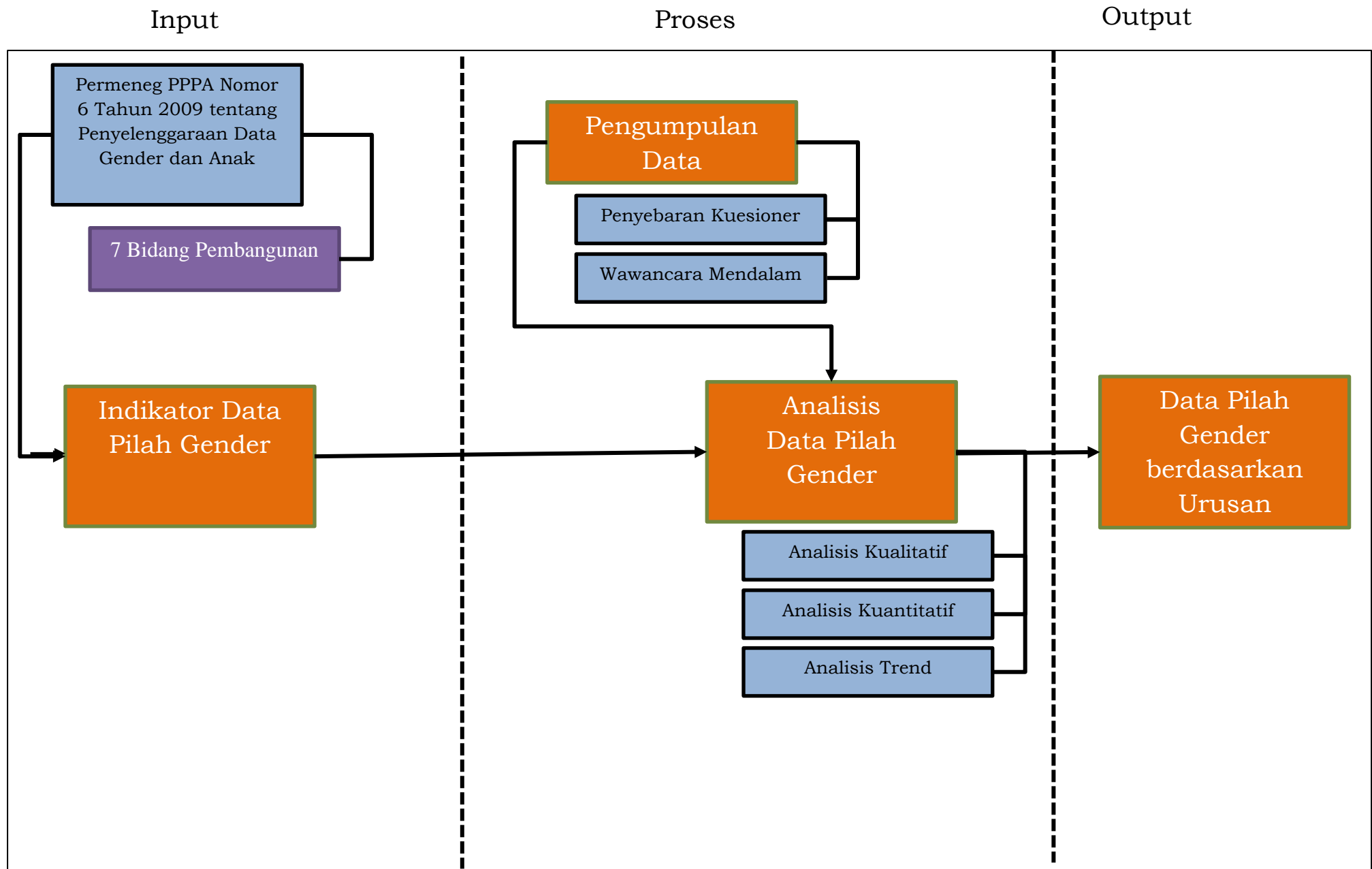
117. Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APB Nasional
118. Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Provinsi
119. Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Kabupaten/Kota
120. Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui CSR
121. Wilayah Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan
122. Luasan Kawasan Kumuh

B. Kerangka Pikir

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data statistik berbasis gender.

Penyusunan data pilah gender dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerangka pikir penyusunan profil gender Kota Semarang Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini:



C. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung maupun jejak pendapat dengan individu atau kelompok orang atau hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya melalui media perantara semisal buku, catatan, bukti rekaman yang sudah ada seperti jurnal yang sudah dipublikasikan. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

2. Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data dalam penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Penyebaran Isian Capaian Kinerja.

Penyebaran form isian capaian kinerja dilakukan kepada seluruh OPD yang terkait dengan pengisian Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Semarang. Indikator form capaian mengacu kepada Permeneq PPPA Nomor 06 Tahun 2009 yang mengatur tentang indikator pada 6 bidang pembangunan.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses dalam memperoleh informasi untuk penelitian dengan cara melakukan proses tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspective responden dalam memandang sebuah permasalahan.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis penelitian dengan landasan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian yang berbentuk angka-angka dan analisa data yang menggunakan statistik

b. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dimana peneliti menjadi instrument kunci dengan pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan triangulasi, analisi data induktif dan kualitatif yang lebih menekan pada makna generalisasi.

BAB IV

ANALISIS DATA GENDER

Analisis data gender disajikan berdasarkan indikator bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Politik dan Pengambilan Keputusan, Hukum dan Sosial Budaya, dengan uraian masing-masing bidang sebagai berikut :

A. Bidang Kesehatan

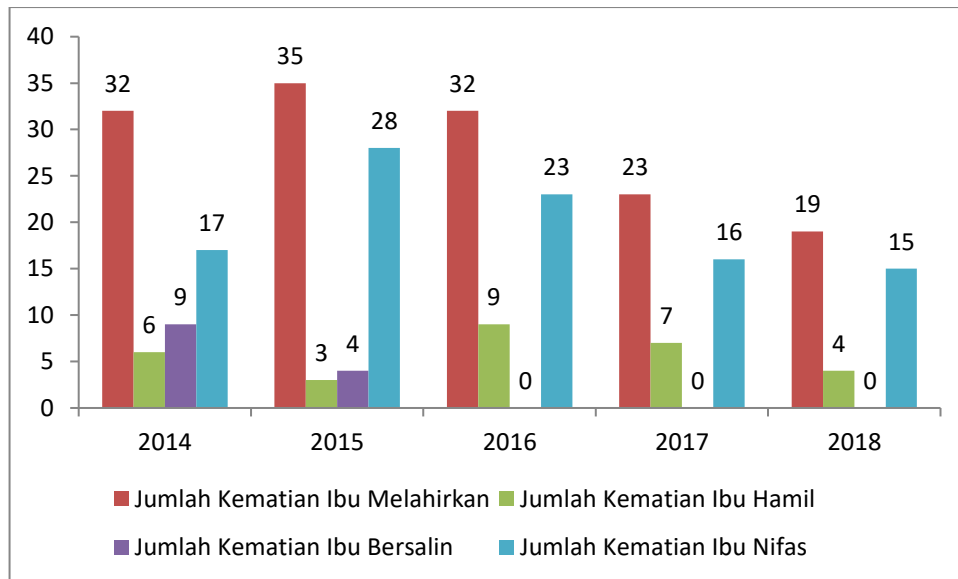
1. Kematian Ibu Maternal

Kematian maternal atau kematian ibu hamil merupakan kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan. Kematian maternal dibagi menjadi 2, yaitu kematian maternal secara langsung dan tidak langsung.

Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75% dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).

a. Kematian Ibu Maternal

Kasus kematian ibu melahirkan di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan utamanya dari kelompok ibu hamil; ibu nifas dan ibu melahirkan. [Kematian ibu maternal di Kota Semarang dalam lima tahun terakhir paling tinggi ada pada kematian ibu melahirkan dan ibu nifas. Walaupun masih tinggi, namun dilihat dari kondisinya, kasus kematian ibu maternal menunjukkan perbaikan setiap tahunnya dengan angka kejadian yang menurun.](#) Untuk capaian jumlah kematian ibu maternal di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



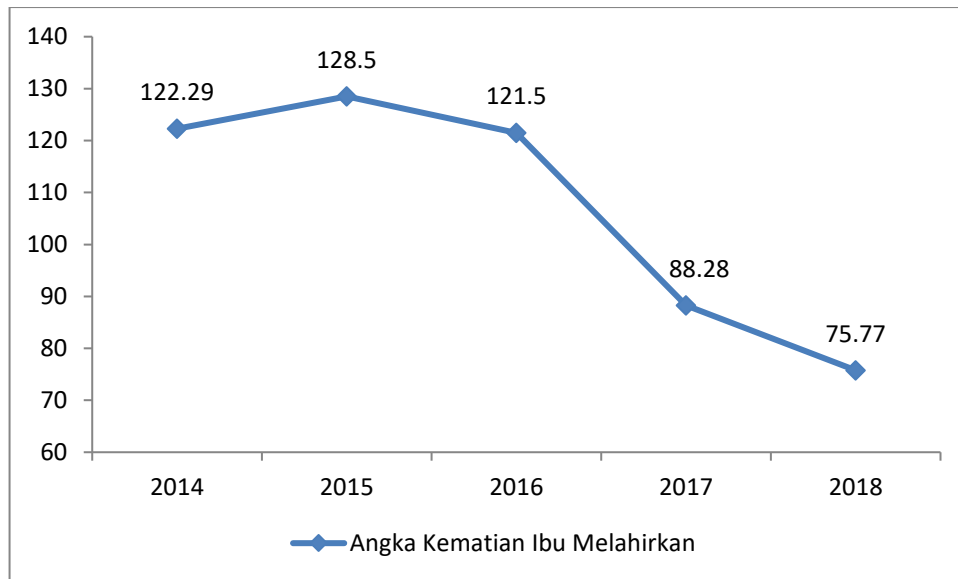
Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.1 Capaian Kasus Kematian Ibu Maternal Kota Semarang Tahun 2014-2018

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 1.000 KH)

Pengertian Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Angka kematian ibu melahirkan di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 mengalami capaian fluktuaktif dari 122,29 per 100.000 KH pada tahun 2014 meningkat pada tahun 2015 menjadi 128,50 per 100.000 KH dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 75,77 per 100.000 KH. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

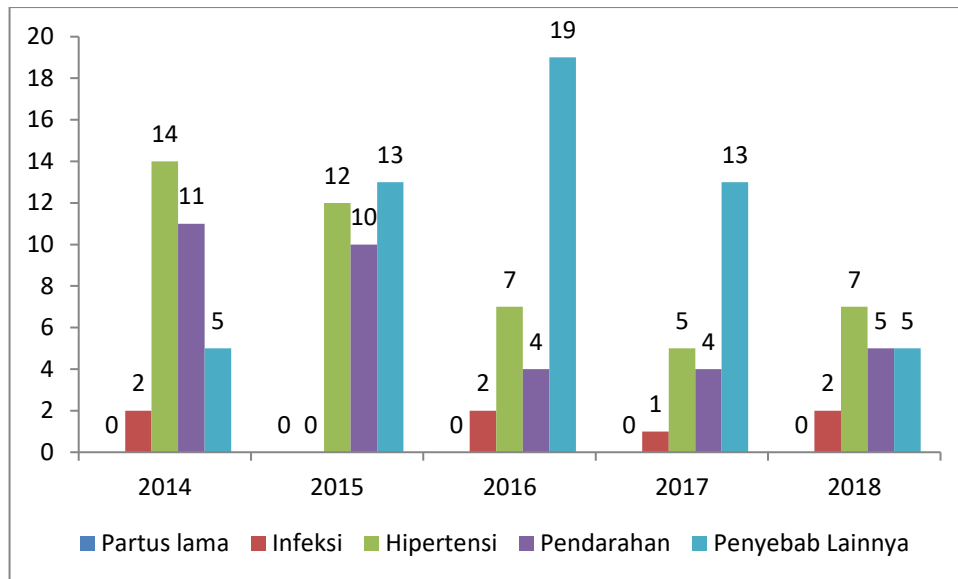


Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.2 Capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 KH Kota Semarang Tahun 2014-2018

c. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Penyebab kematian ibu melahirkan di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain partus lama, infeksi, hipertensi, pendarahan dan penyebab lainnya. Jumlah kasus penyebab kematian ibu melahirkan tahun 2018 lebih banyak disebabkan oleh penyakit hipertensi yang diderita oleh ibu hamil sehingga berujung pada terjadinya pre-reklamsia. Penyebab kedua dari kasus pendarahan ibu hamil di Kota Semarang adalah terjadinya pendarahan pada ibu hamil, yaitu sebanyak 5 kasus. Kasus pendarahan pada ibu hamil banyak disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain 1) terlalu sering melahirkan, misalnya ibu yang melahirkan lebih dari 3 kali; 2) kondisi kesehatan ibu akibat penyakit kronis dan anemia (kurang darah) dan gisi yang buruk; dan 3) gangguan pembekuan darah.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.3 Jumlah Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Kasus)

2. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan merupakan program yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Semarang guna meminimalisir terjadinya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi. Penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan dianjurkan oleh Pemerintah Kota Semarang, mengingat kapasitas yang memadai dari tenaga kesehatan tersebut.

Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan pada fasyankes di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan mengingat pada tahun 2018 cakupan pelayanan kelahiran oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100%. Adapun jumlah kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 25.150 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.1 Cakupan Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes Kota Semarang Tahun 2014-2018 (%)

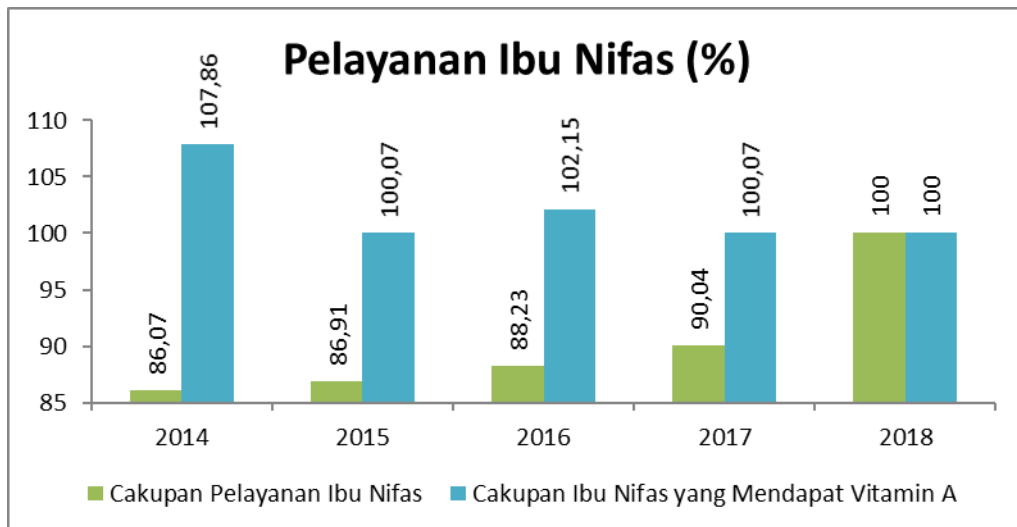
3. Pelayanan Ibu Nifas

Masa nifas adalah masa pemulihan paska persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu paska persalinan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan pemeriksaan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu :

1. Kunjungan pertama (KF1) : 6 jam – 3 hari setelah persalinan
2. Kunjungan kedua (KF2) : 4 - 28 hari setelah persalinan
3. Kunjungan ketiga (KF3) : 29 - 42 hari setelah persalinan

Cakupan pelayanan ibu nifas di Kota Semarang pada tahun 2018 mengalami peningkatan capaian yang signifikan, dari 86,07 pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan pada masa nifas semakin meningkat disamping adanya tindakan preventif yaitu kunjungan dari petugas Puskesmas dengan menggunakan dana BOK dan pendampingan ibu hamil oleh Gasurkes dan kader kesehatan.

Salah satu upaya program penanggulangan kekurangan vitamin A adalah pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi (200.000 SI) pada ibu nifas. Dosis yang diberikan sebanyak 2 kapsul. Pencapaian pemberian vitamin A ibu nifas di Kota Semarang tahun 2018 sebanyak 27.874 ibu nifas dengan capaian mencapai 100%.

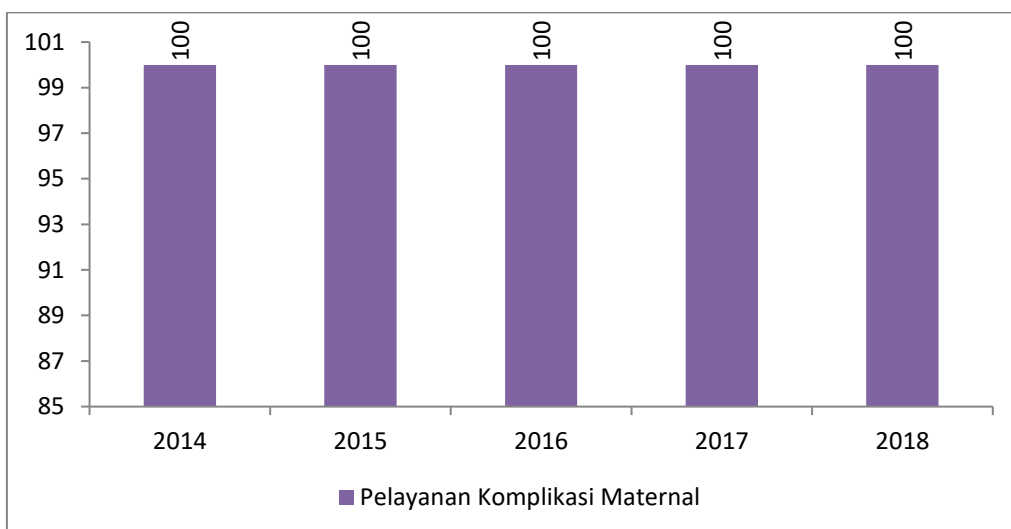


Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.2 Capaian Pelayanan Ibu Nifas, Pelayanan Komplikasi Maternal dan Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A Kota Semarang Tahun 2014-2018 (%)

4. Pelayanan Komplikasi Maternal

Kehamilan dapat memungkinkan seorang ibu mengalami komplikasi selama masa kehamilannya. Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi dalam kandungan. Pelayanan komplikasi maternal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018 telah mencapai 100% atau seluruhnya mencakup ibu hamil yang mengalami permasalahan dalam proses kehamilan. Pada tahun 2018 jumlah kasus komplikasi yang ditangani sebesar 1.923 kasus. Adapun jumlah total ibu hamil adalah 26.131 orang.



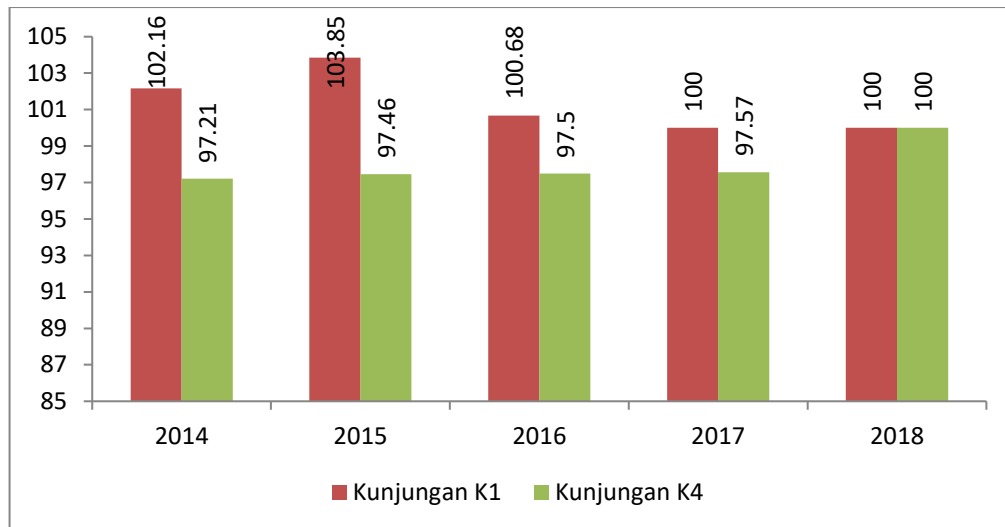
Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.3 Capaian Pelayanan Komplikasi Maternal Kota Semarang Tahun 2014-2018 (%)

5. Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil K1 untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, yaitu paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga. Cakupan K1 sebagai indikator akses pelayanan antenatal pertama pada ibu hamil di suatu wilayah, sedangkan cakupan K4 digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan) yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan keberlangsungan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC) meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus uteri, pemeriksaan kehamilannya, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi TT, pemeriksaan Hb, konsultasi, dan pemeriksaan lain sesuai dengan keadaan ibu hamil.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 Kota Semarang pada tahun 2018 adalah 100 % (26.131 kunjungan). Kondisi yang sama ditunjukkan oleh capaian kunjungan K4 yang juga mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri pada masa kehamilan sudah baik dengan ditunjang ketersediaan gasurkes yang mendorong capaian tersebut. Cakupan kunjungan ibu hamil pada K1/K4 di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

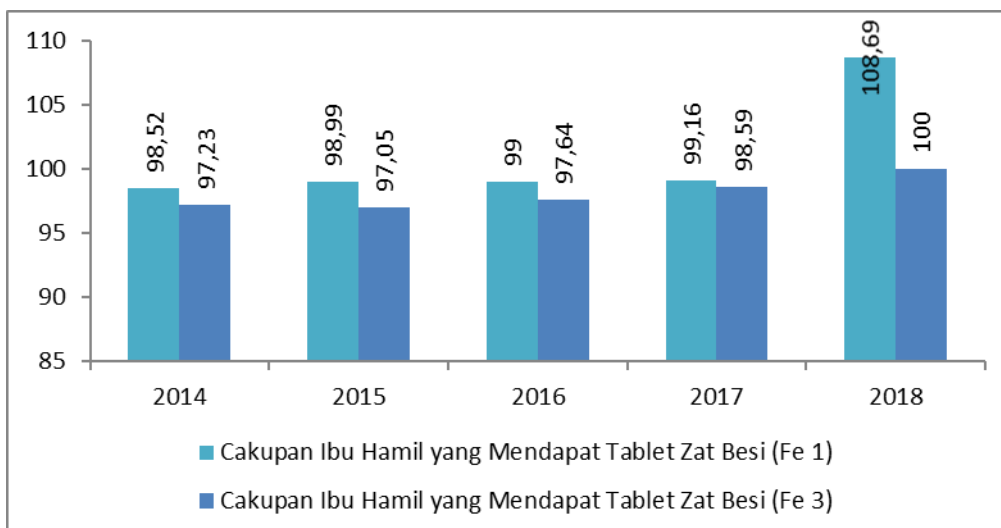


Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.1 Capaian Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Kasus)

6. Pemberian Tablet Fe1 dan Fe3

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil merupakan upaya penanggulangan anemia gizi besi yang diberikan pada trimester I sampai dengan trimester III yang meliputi Fe 30 tablet, Fe 90 tablet. Cakupan pemberian Fe30 pada ibu hamil di tahun 2018 sebesar 108,69% dari jumlah total ibu hamil, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2017 sebesar 97%. angka cakupan melebihi 100% dikarenakan ibu hamil yang mendapat Fe30 tidak hanya penduduk Kota Semarang (luar wilayah). Cakupan pemberian Fe90 pada ibu hamil di tahun 2018 sebesar 100% dari jumlah total ibu hamil sudah memenuhi target. Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 30 dan Fe 90 di Kota Semarang tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

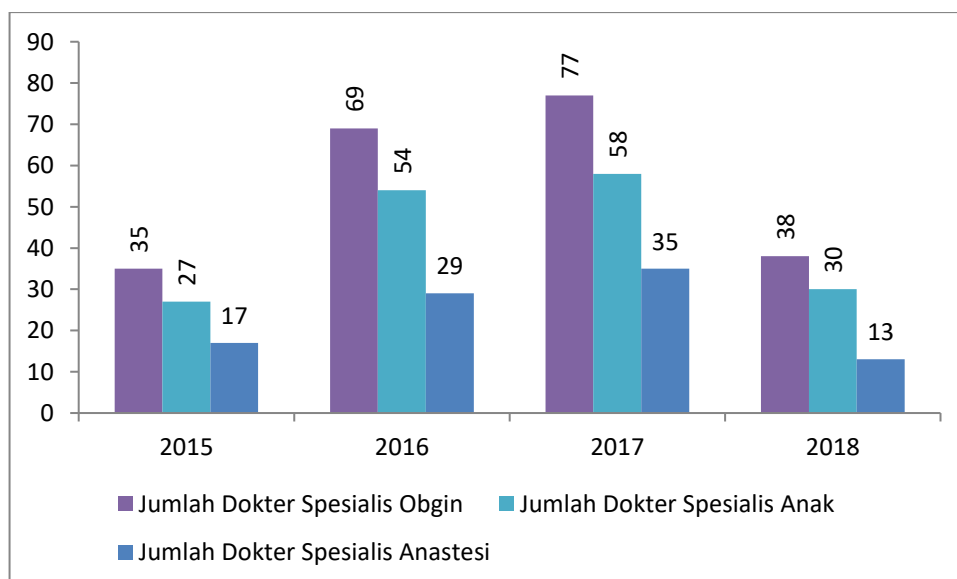
Gambar 4.2 Capaian Ibu Hamil Mendapat Fe1 dan Fe3 Kota Semarang Tahun 2014-2018

7. Jumlah Tenaga Kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang kesehatan sangat diperlukan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan, yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dan selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan secara keilmuan dan ketrampilannya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir disebabkan antara lain karena sifat data ketenagaan yang selalu berubah terus-menerus dan melibatkan lintas organisasi sehingga sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat ditampilkan secara lengkap, akurat dan sistematis.

Tenaga kesehatan di Kota Semarang dilihat dari dokter spesialis obgin, dokter sepesialis anak dan dokter spesialis anastasi, jumlah tenaga kesahatan dari tahun 2015-2018 lebih banyak jumlah dokter spesialis obgin dibandingkan dokter spesialis anastesi. Jumlah dokter spesialis obgin pada tahun 2018 sebanyak 38 orang, dokter spesialis anak sebanyak 30 orang dan dokter spesialis anastesi sebanyak 13 orang, selengkapnya data jumlah tenaga kesehatan dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



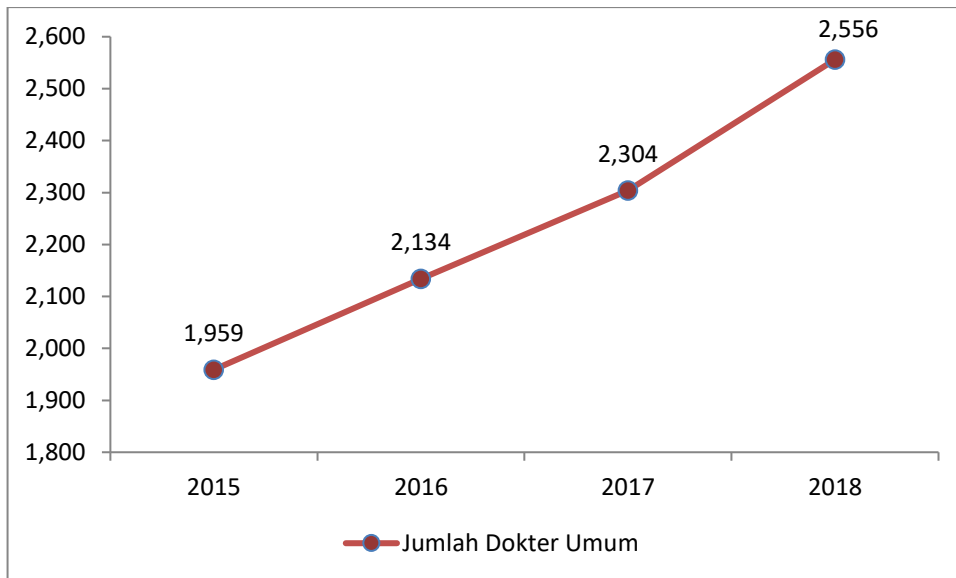
Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Semarang Tahun 2015-2018

a. Jumlah Dokter Umum

Dokter umum adalah dokter yang fokus dalam mengobati penyakit yang muncul secara tiba-tiba (akut) dan menahun (kronis), juga dikenal sebagai dokter layanan pertama. Perbedaan dengan dokter spesialis adalah, dokter umum menyediakan pelayanan yang bersifat menyeluruh terhadap pasien. Dokter umum juga memegang peranan penting pada area kedokteran karena mereka seringkali menjadi orang yang pertama berhubungan dengan pasien. Dokter umum tidak terikat untuk mengobati bagian atau organ tubuh tertentu, sehingga mereka memiliki keahlian luas yang membantu mereka untuk menolong pasien pada segala usia, jenis kelamin dan dengan berbagai masalah kesehatan.

Jumlah Dokter umum di Kota Semarang pada tahun 2015-2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan atau bertambah, pada tahun 2015 sebanyak 1.959 orang hingga tahun 2018 sebanyak 2.556 orang dari data dinas kesehatan Kota Semarang. Berikut gambar jumlah dokter umum di Kota Semarang dari tahun 2015-2018.



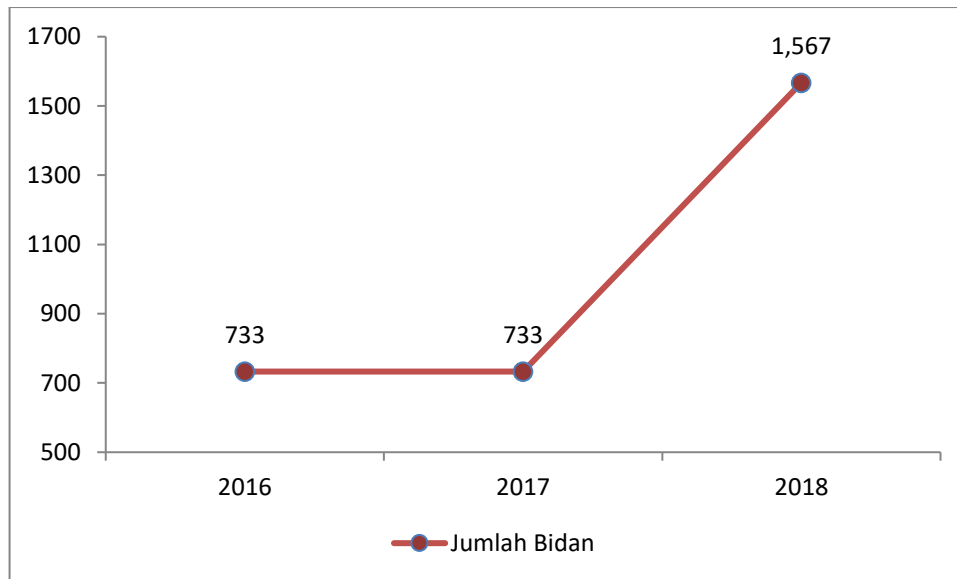
Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.2 Jumlah Dokter Umum di Kota Semarang Tahun 2015-2018 (Orang)

b. Jumlah Bidan

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin

yang sah untuk melakukan praktik bidan. Jumlah bidan di Kota Semarang pada tahun 2018 mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2017.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

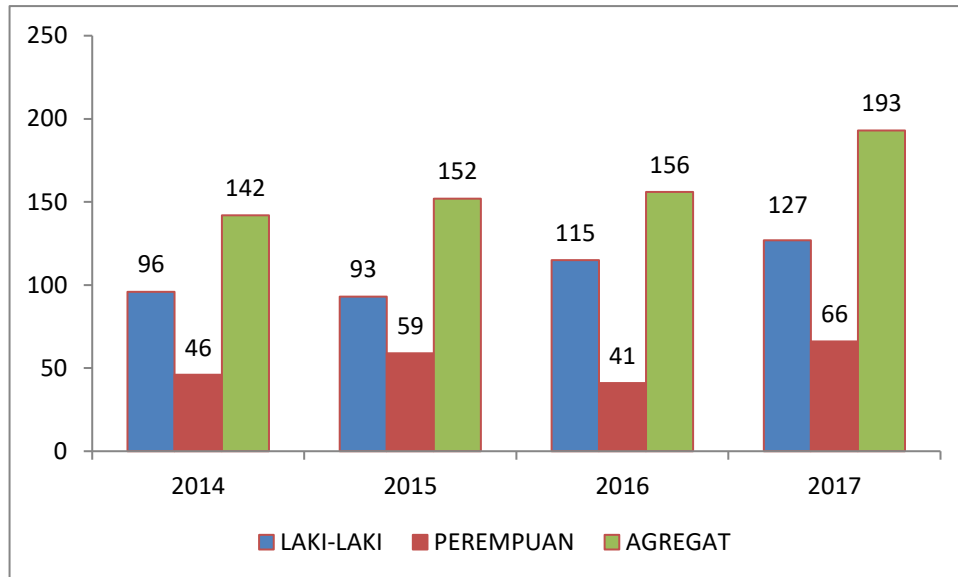
Gambar 4.3 Jumlah Bidan di Kota Semarang Tahun 2016-2018 (Orang)

8. Jumlah Penderita HIV/AiDS

HIV/AIDS merupakan hal yang berbeda tetapi saling berhubungan. *Human Immunodeficiency Virus* atau biasa disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Sementara itu, AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari infeksi virus HIV. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain, seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia.

Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2017. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Semarang lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena mobilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga risiko untuk terinfeksi HIV lebih besar. Jumlah penderita HIV/AIDS laki-laki pada tahun 2017 sebanyak 127

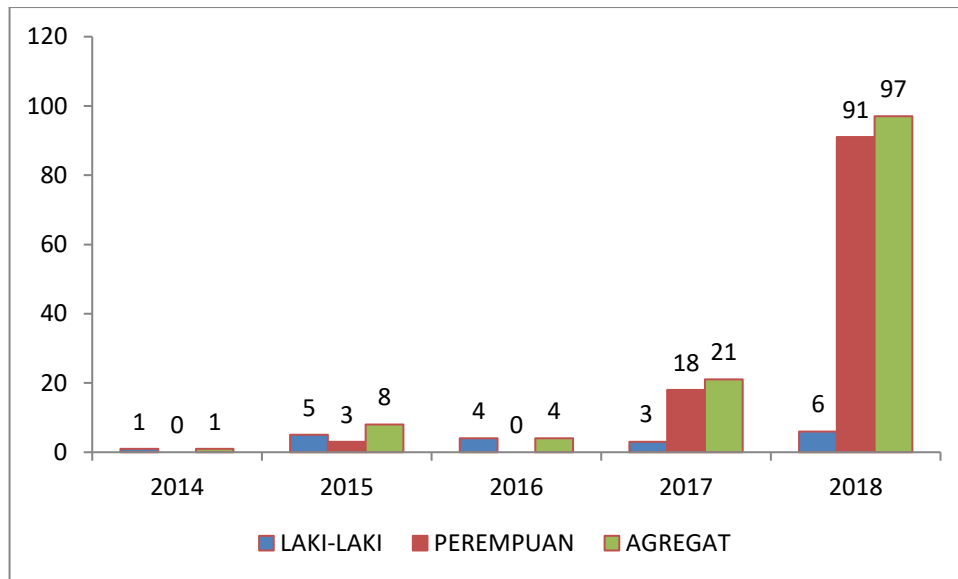
orang dan perempuan sebanyak 66 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan temuan pada tahun 2016 yang hanya mencapai 156 kasus. Tingginya penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang menjadi fenomena yang tidak dapat dilepaskan begitu saja mengingat mekanisme penyebaran yang relatif mudah dan masif. Perkembangan penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.4 Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kota Semarang Tahun 2014-2017 (Orang)

Jumlah penderita HIV/AIDS usia 0-18 tahun dari tahun 2014 – 2018 lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Jumlah penderita HIV/AIDS usia 0-18 tahun perempuan pada tahun 2018 sebanyak 91 orang dan laki-laki 6 orang di Kota Semarang. Tingginya kasus HIV/AIDS pada usia anak di Kota Semarang sebagian besar disebabkan oleh adanya penularan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.5 Jumlah Penderita HIV/AIDS Usia 0-18 Tahun di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

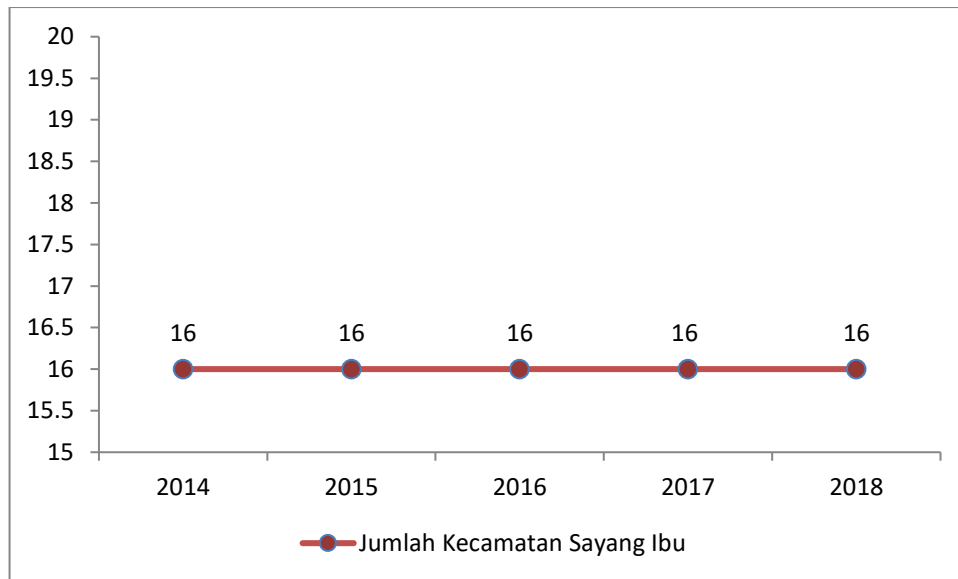
9. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

Dalam pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kecamatan merupakan lini terdepan untuk mensinergikan antara pendekatan lintas sektor dan masyarakat dengan pendekatan sosial budaya secara komprehensif utamanya dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagai suatu gerakan, Gerakan Sayang Ibu (GSI) telah memberikan kontribusi yang dirasakan manfaatnya dengan adanya data, berkurangnya jumlah kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, serta meningkatnya rujukan yang berhasil ditangani.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan sektor pemerintah, maka pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) perlu disesuaikan agar dapat bersinergi dan terintegrasi dengan program dan kegiatan lain yang ada pada daerah. Oleh karena itu diperlukan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI). Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah upaya pengembangan Gerakan Sayang Ibu (GSI) melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi dan institusionalisasi.

Untuk mendorong pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) perlu dilaksanakan berbagai upaya termasuk melalui penilaian untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di tingkat Kecamatan. Dengan adanya Kecamatan Sayang Ibu diharapkan peran pembinaan dan fasilitasi Kab./Kota dan Provinsi menjadi lebih optimal.

Jumlah kecamatan sayang ibu di Kota Semarang dari tahun 2014-2018 pada 16 Kecamatan sudah menjadi Kecamatan Sayang Ibu (KSI), untuk data selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

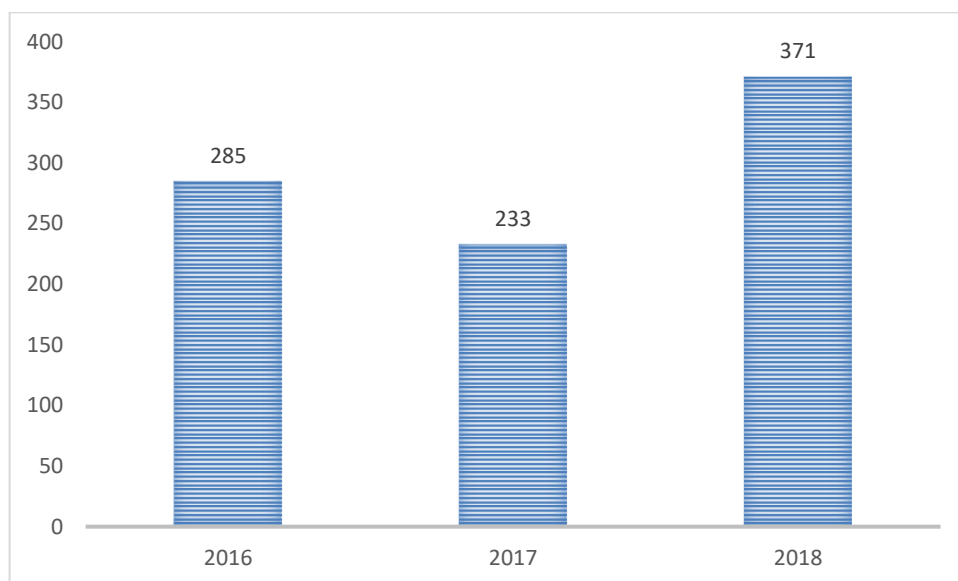


Sumber : Data Dinas Kesehatan tahun 2019, diolah

Gambar 4.6 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Kecamatan)

10. Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan

Jumlah kelompok Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan (GPPL) di Kota Semarang pada tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan kendati pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah kelompok GPPL mencapai 371 kelompok yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Semarang.



Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, diolah

Gambar 4.7 Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Kota Semarang Tahun 2016-2018 (kelompok)

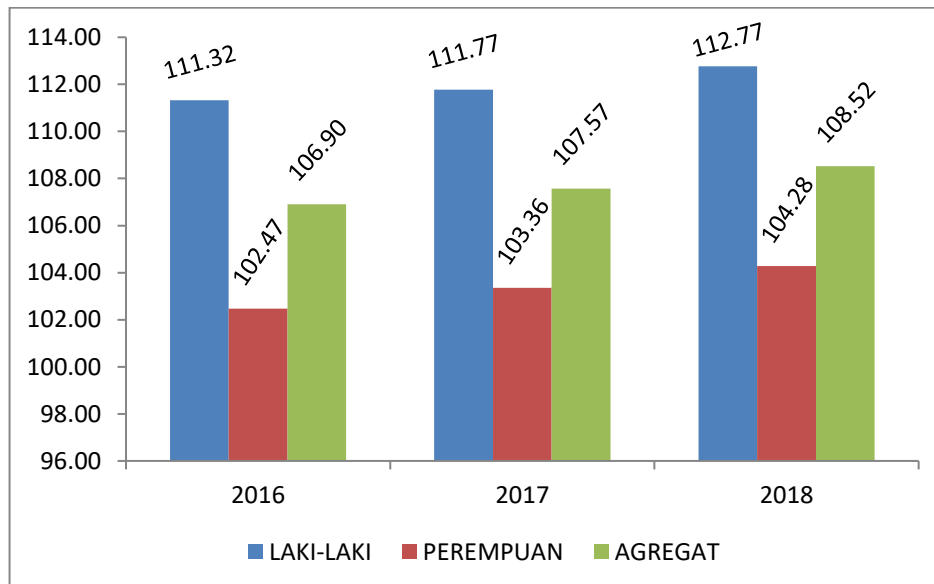
B. Bidang Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (111,32 %) ke tahun 2018 menjadi (112,77 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (102,47 %) ke tahun 2018 (104,28 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (106,90 %) ke tahun 2018 (108,52 %). Hal ini menunjukkan APS usia 7-12 tahun Kota Semarang antara laki-laki dan perempuan adanya peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

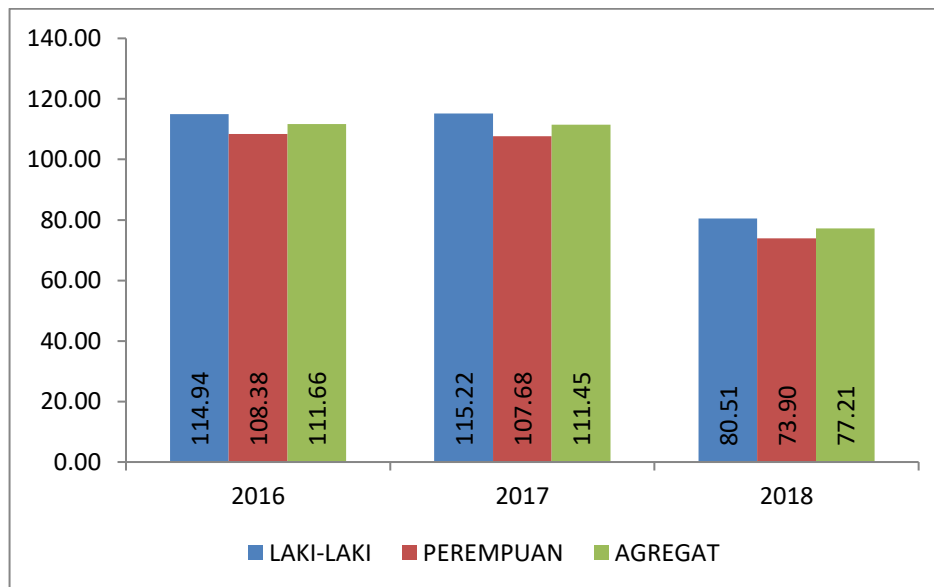


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.8 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun, Tahun 2016-2018 (%)

b. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan usia 13-15 tahun dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (114,94 %) ke tahun 2018 menjadi (80,51 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (108,38 %) ke tahun 2018 (73,90 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (111,66 %) ke tahun 2018 (77,21 %). Hal ini menunjukkan adanya penurunan APS usia 13-15 tahun pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

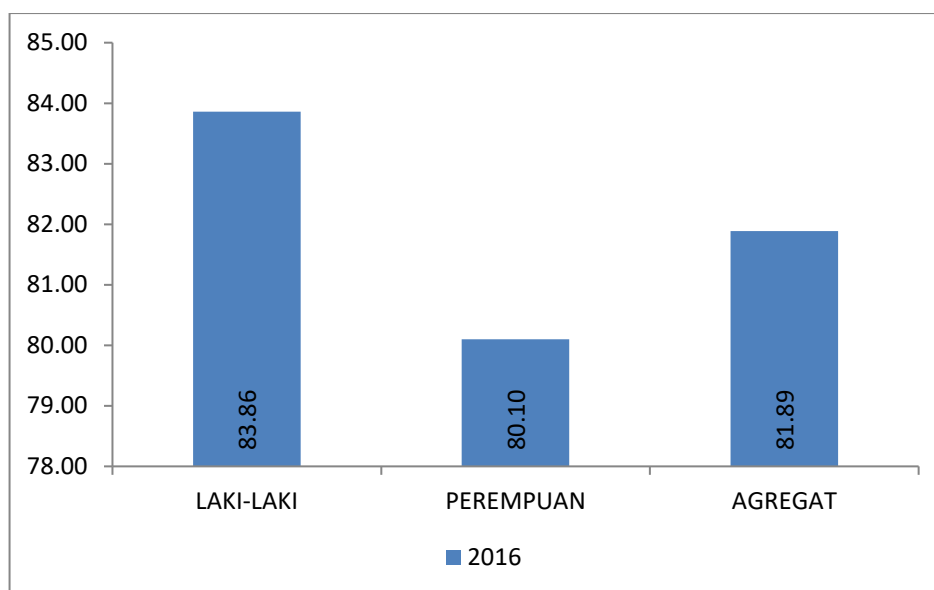


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.9 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun, Tahun 2016-2018 (%)

c. Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan usia 16-18 tahun pada tahun 2016, dilihat dari laki-laki sebesar (83,86 %) dan perempuan sebesar (80,20 %), kemudian agregat sebesar (81,89 %). Hal ini menunjukkan tidak terlalu jauh kesenjangan APS usia 16-18 tahun antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.10 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun, Tahun 2016 (%)

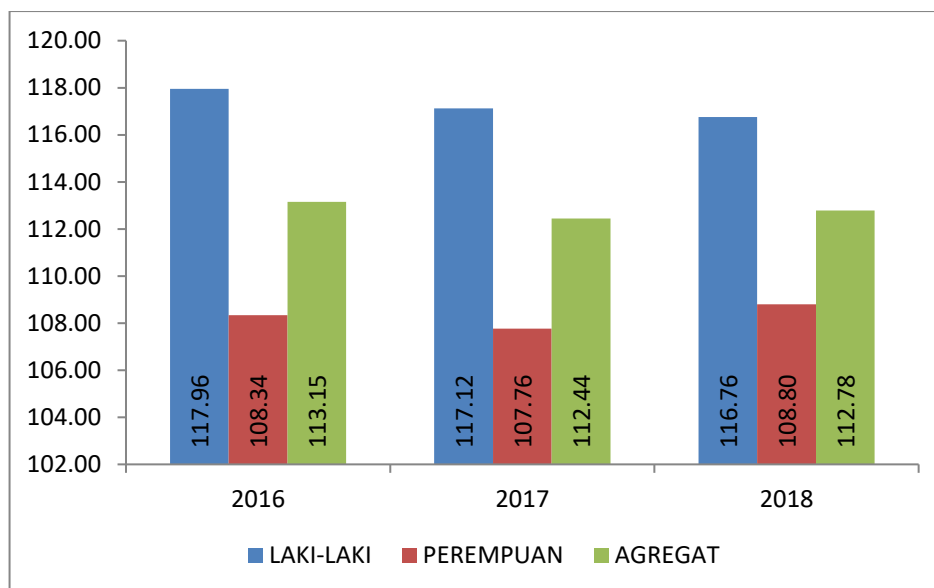
2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

a. APK Sekolah Dasar Sederajat

APK SD sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (117,96 %) ke tahun 2018 menjadi (116,76 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (108,34 %) ke tahun 2018 (108,80 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (113,15 %) ke tahun 2018 (112,78 %). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan APK SD Sederajat pada perempuan dan sebaliknya penurunan pada APK laki-laki di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

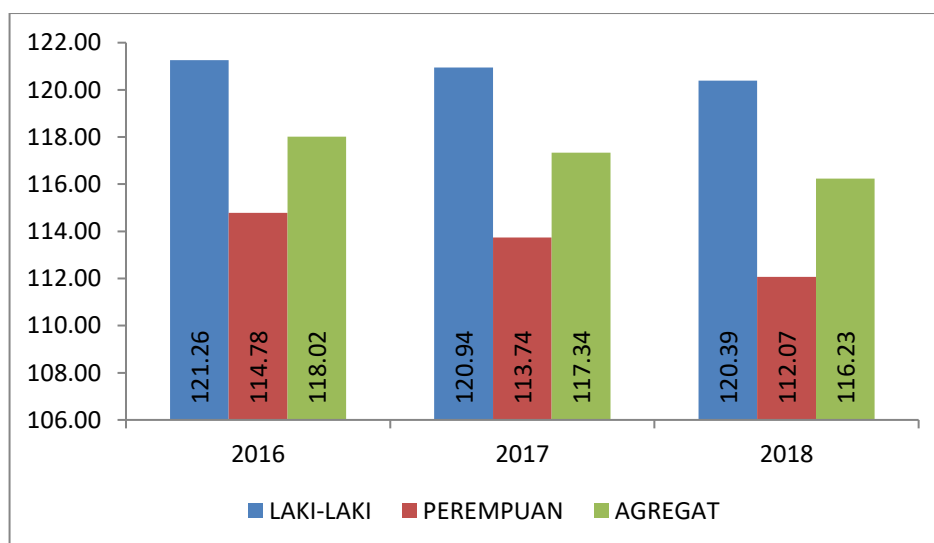


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.11 Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

b. APK Sekolah Menengah Pertama Sederajat

APK SMP sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (121,26 %) ke tahun 2018 menjadi (120,39 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (114,78 %) ke tahun 2018 (112,07 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (118,02 %) ke tahun 2018 (116,23 %). Hal ini menunjukkan adanya peurunan APK SMP Sederajat pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

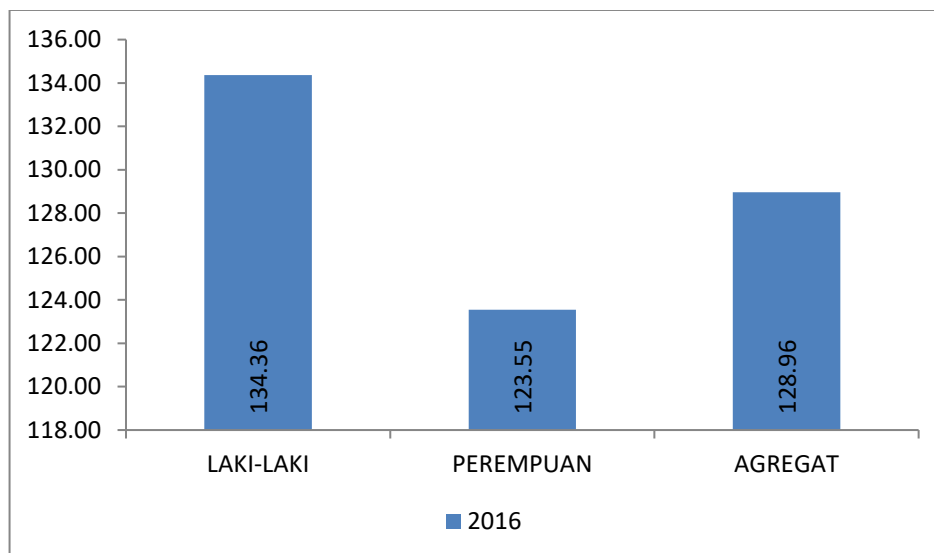


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.12 Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

c. APK Sekolah Menengah Atas Sederajat

APK SMA sederajat pada tahun 2016, dilihat dari laki-laki sebesar (134,36 %) dan perempuan sebesar (123,55 %), kemudian agregat sebesar (128,96 %). Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cukup jauh APK SMA sederajat antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.13 Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat Tahun 2016 (%)

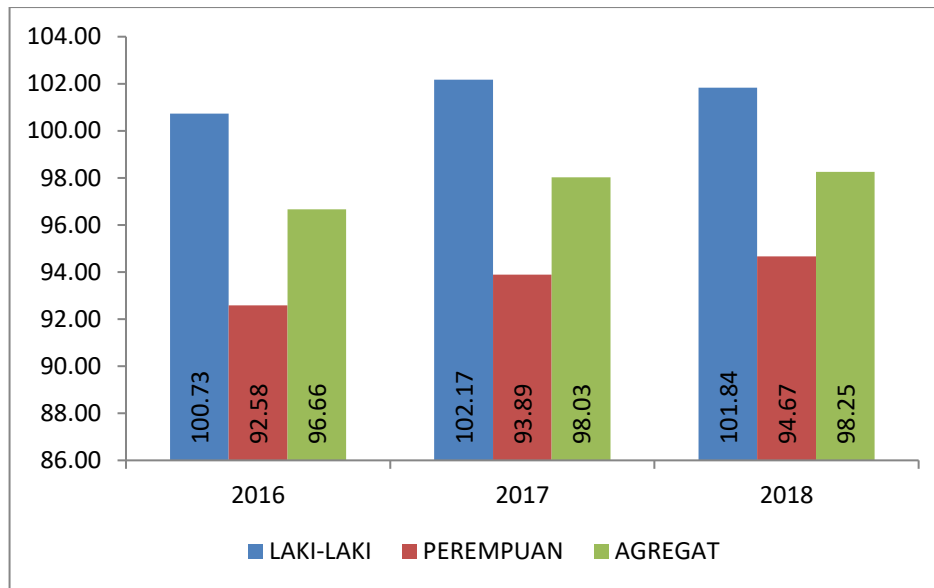
3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

a. Angka Partisipasi Murni SD Sederajat

APM SD sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (100,73 %) ke tahun 2018 menjadi (101,84 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (92,58 %) ke tahun 2018 (94,67 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (96,66 %) ke tahun 2018 (98,25 %). Hal ini

menunjukkan adanya kenaikan APM SD Sederajat pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

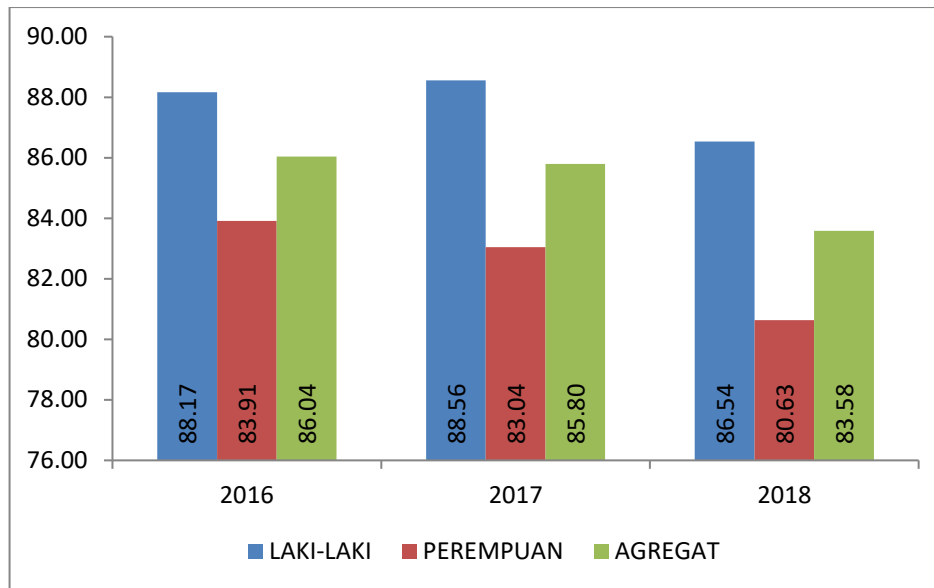


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.14 Angka Partisipasi Murni SD Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

b. Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat

APM SMP sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (88,17 %) ke tahun 2018 menjadi (86,54 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (83,91 %) ke tahun 2018 (80,63 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (86,04 %) ke tahun 2018 (83,58 %). Hal ini menunjukkan adanya penurunan APM SMP Sederajat pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

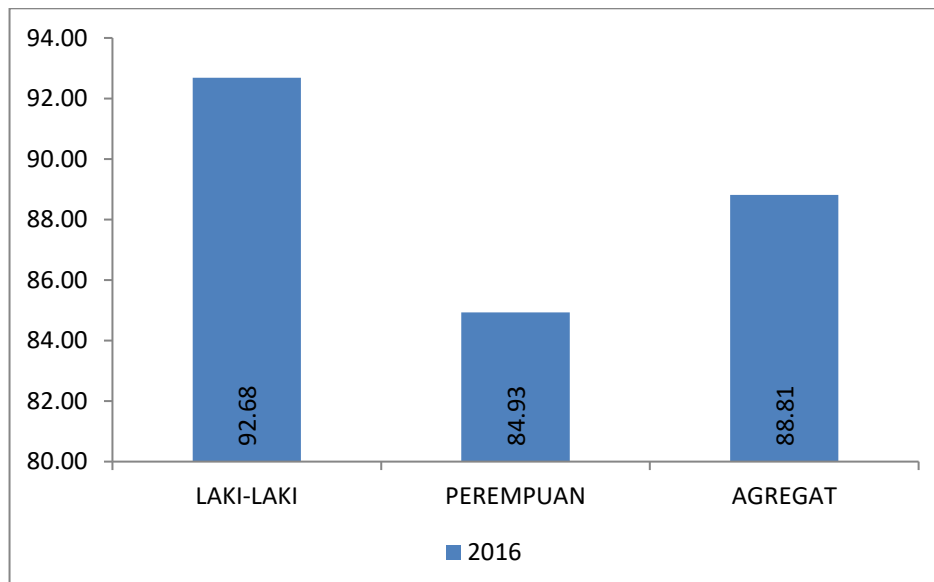


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.15 Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

c. Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat

APM SMA sederajat pada tahun 2016, dilihat dari laki-laki sebesar (92,68 %) dan perempuan sebesar (84,93 %), kemudian agregat sebesar (88,81 %). Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cukup jauh APM SMA sederajat antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

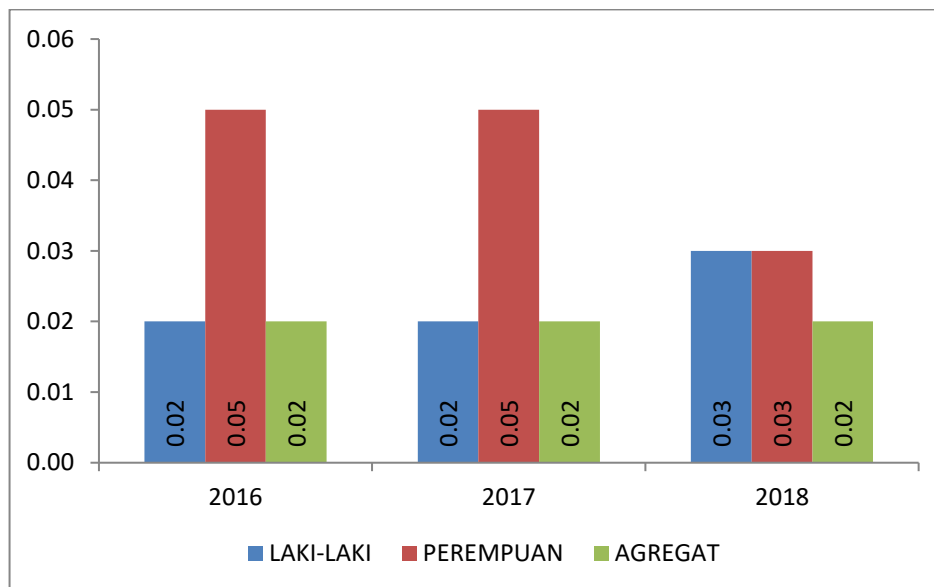
Gambar 4.16 Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat Tahun 2016

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, angka putus sekolah menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat pada jenjangnya yang dinyatakan dalam persen. Semakin besar capaian yang di hasilkan dalam persen, semakin tidak bagus untuk capainnya dan begitu juga sebaliknya.

a. Angka Putus Sekolah SD Sederajat

APtS SD sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (0,02 %) ke tahun 2018 menjadi (0,03 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (0,05 %) ke tahun 2018 (0,03 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (0,02 %) ke tahun 2018 (0,02 %). Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pada APtS SD Sederajat pada laki-laki dan sebaliknya untuk perempuan mengalami penurunan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

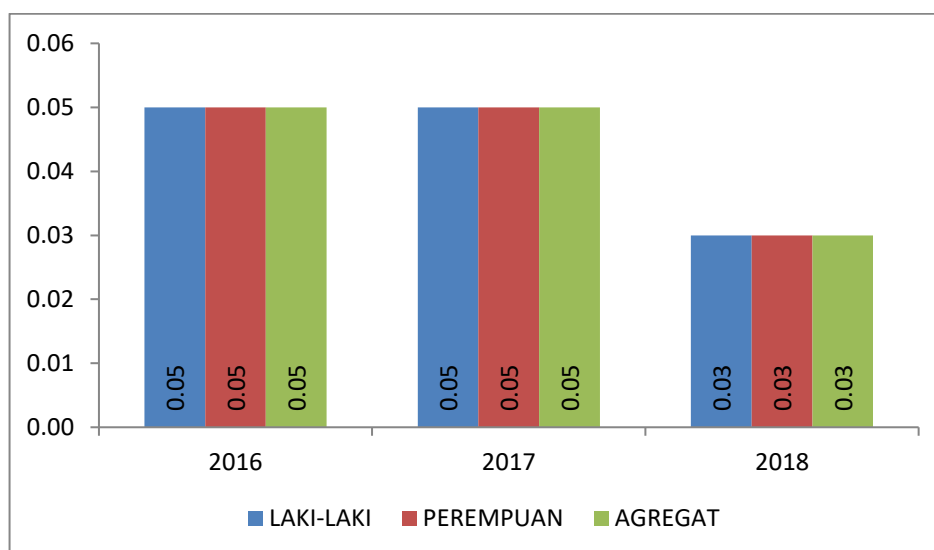


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.17 Angka Putus Sekolah SD Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

b. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

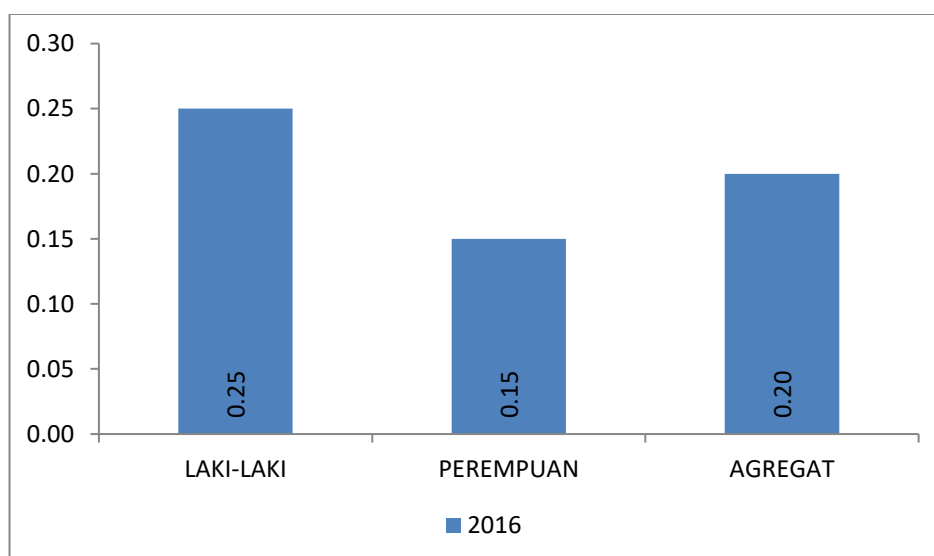
APtS SMP sederajat dalam kurun waktu tiga tahun, dilihat dari laki-laki tahun 2016 (0,05 %) ke tahun 2018 menjadi (0,03 %), untuk perempuan pada tahun 2016 (0,05 %) ke tahun 2018 (0,03 %), kemudian agregat dari tahun 2016 (0,05 %) ke tahun 2018 (0,03 %). Hal ini menunjukkan adanya penurunan pada APtS SMP Sederajat pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah
Gambar 4.18 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Tahun 2016-2018 (%)

c. Angka Putus Sekolah SMA Sederajat

APtS SMA sederajat pada tahun 2016, dilihat dari laki-laki sebesar (0,25 %) dan perempuan sebesar (0,15 %), kemudian agregat sebesar (0,25 %). Hal ini menunjukkan kesenjangan yang dirasa cukup jauh APtS SMA sederajat antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah
Gambar 4.19 Angka Putus Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 (%)

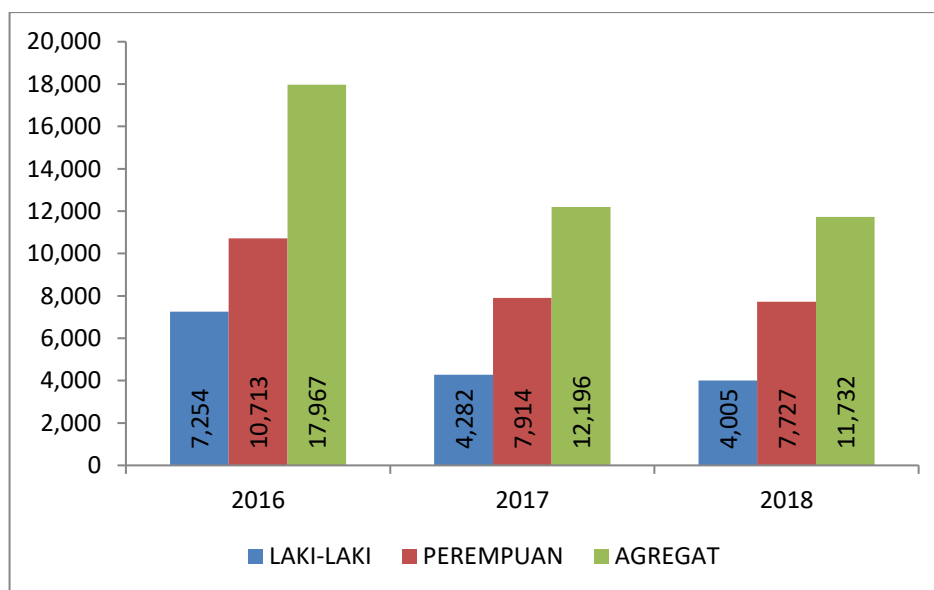
5. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu input vital yang menentukan kualitas layanan pembelajaran. Pendidik dan kependidikan berperan sebagai agen pembelajaran seperti dikutip dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 28: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

a. Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah Guru yang memenuhi kalifikasi S1/D-IV dalam kurun waktu tiga tahun di Kota Semarang, dilihat dari laki-laki tahun 2016 sejumlah 7.254 orang pada tahun 2018 menjadi sejumlah 4.005 orang, perempuan pada tahun 2016 sejumlah 10.713 orang dan tahun 2018 sejumlah 7.727 orang, kemudian agregat dari tahun 2016 sejumlah 17.967 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 11.732 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pada jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



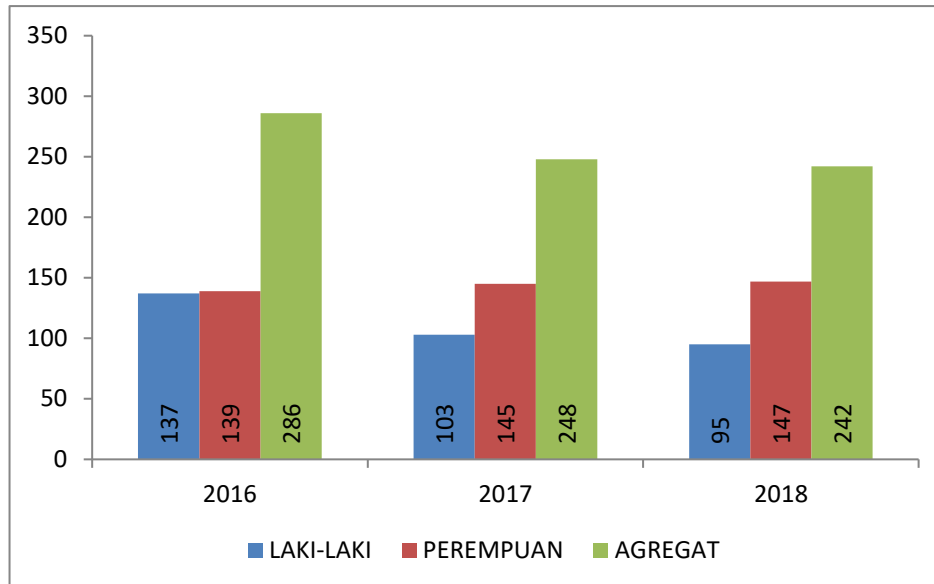
Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.20 Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2016-2018

b. Jumlah Tutor Kejar Paket A, B dan C

Jumlah Guru/Tutor Kejar Paket A, B dan C dalam kurun waktu tiga tahun di Kota Semarang, dilihat dari laki-laki tahun 2016 sejumlah 137 orang pada tahun 2018 menjadi sejumlah 95 orang, perempuan pada tahun

2016 sejumlah 139 orang dan tahun 2018 sejumlah 147 orang, kemudian agregat dari tahun 2016 sejumlah 286 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 242 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pada jumlah guru/tutor kejar paket A, B dan C pada laki-laki sebanyak 42 orang dan sebaliknya perempuan meningkat 7 orang di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

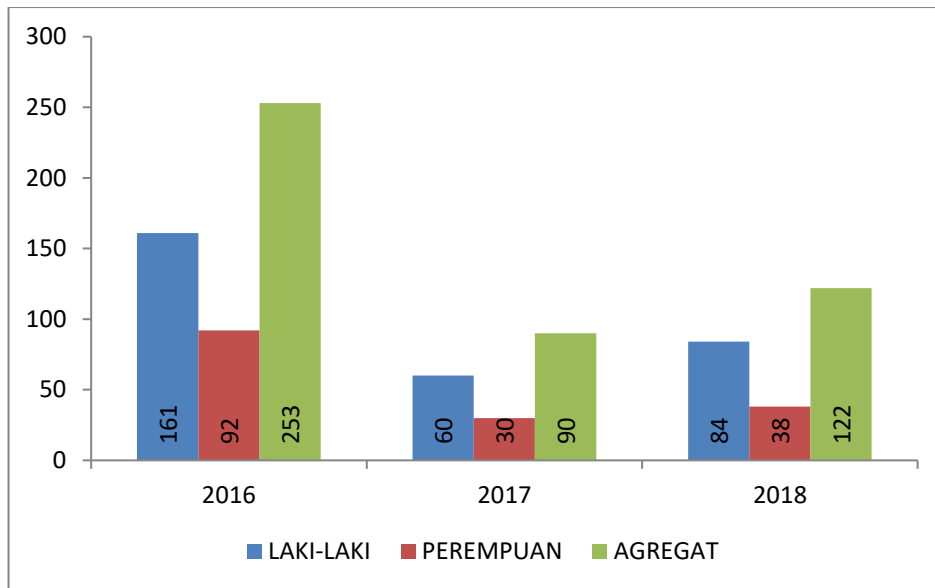
Gambar 4.21 Jumlah Guru/Tutor Kejar Paket A, B dan C Tahun 2016-2018 (Orang)

6. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA.

a. Jumlah Peserta Paket A

Jumlah peserta/murid kejar paket A dalam kurun waktu tiga tahun di Kota Semarang, dilihat dari laki-laki tahun 2016 sejumlah 161 orang pada tahun 2018 menjadi sejumlah 84 orang, sedangkan perempuan pada tahun 2016 sejumlah 92 orang dan tahun 2018 sejumlah 38 orang, kemudian agregat dari tahun 2016 sejumlah 253 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 122 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup besar pada jumlah peserta/murid kejar paket A pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



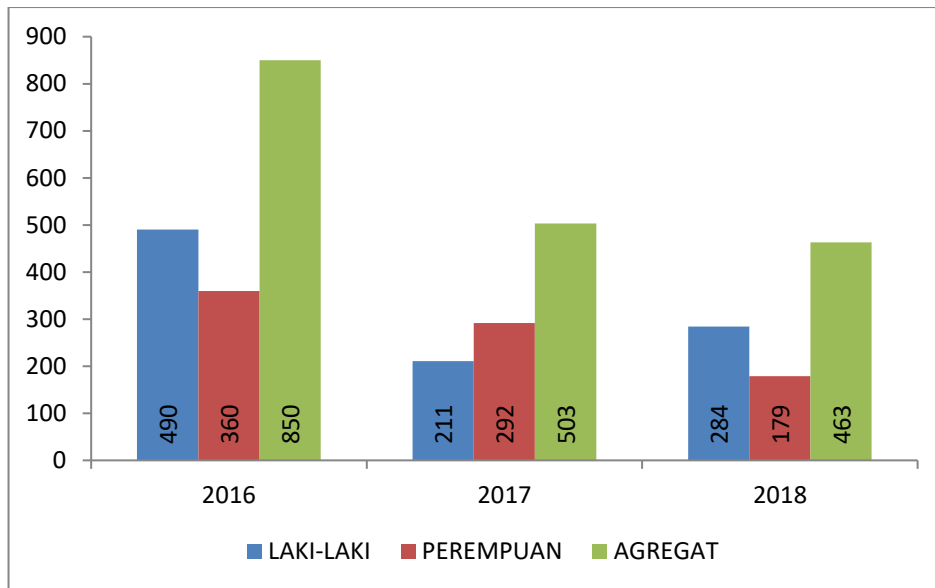
Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.22 Jumlah Peserta/Murid Paket A Tahun 2016-2018 (Orang)

Semakin turun jumlah peserta/murid kejar paket A, menunjukkan semakin baik untuk angka kelulusan jenjang sekolah dasar.

b. Jumlah Peserta Paket B

Jumlah peserta/murid kejar paket B dalam kurun waktu tiga tahun di Kota Semarang, dilihat dari laki-laki tahun 2016 sejumlah 490 orang pada tahun 2018 menjadi sejumlah 284 orang, sedangkan perempuan pada tahun 2016 sejumlah 360 orang dan tahun 2018 sejumlah 179 orang, kemudian agregat dari tahun 2016 sejumlah 850 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 463 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup besar pada jumlah peserta/murid kejar paket B pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

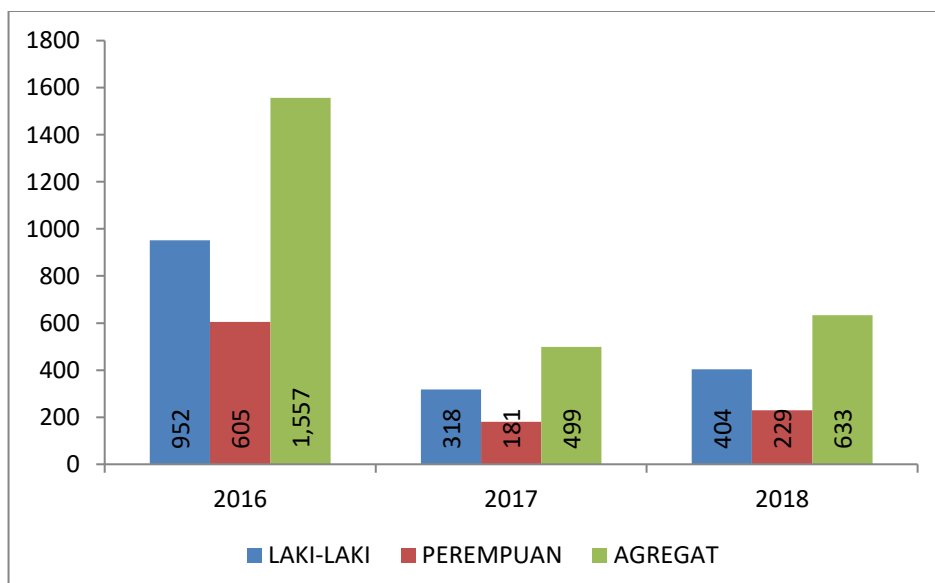


Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah

Gambar 4.23 Jumlah Peserta/Murid Kejar Paket B Tahun 2016-2018 (Orang)

c. Jumlah Peserta Paket C

Jumlah peserta/murid kejar paket C dalam kurun waktu tiga tahun di Kota Semarang, dilihat dari laki-laki tahun 2016 sejumlah 952 orang pada tahun 2018 menjadi sejumlah 404 orang, sedangkan perempuan pada tahun 2016 sejumlah 605 orang dan tahun 2018 sejumlah 229 orang, kemudian agregat dari tahun 2016 sejumlah 1.557 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 633 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup besar pada jumlah peserta/murid kejar paket C pada laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pendidikan tahun 2019, diolah
Gambar 4.24 Jumlah Peserta/Murid Kejar Paket C Tahun 2016-2018 (Orang)

C. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Jumlah Pencari Kerja

Salah satu alasan mengapa selalu ada pengangguran dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (job search) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah. Pekerja-pekerja yang diberhentikan akan secepatnya menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengannya. Tetapi, pada kenyataannya, para pekerja mempunyai selera yang berbeda-beda, pekerjaan-pekerjaan yang ada sangat berbeda satu sama lain, dan informasi mengenai calon pekerja dan lowongan pekerjaan tersebar dengan lambat diantara berbagai perusahaan serta rumah tangga dalam perekonomian.

Program-program pemerintah berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui badan tenaga kerja pemerintah, yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Cara lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik, yang bertujuan mempermudah penyaluran tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan ke perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan untuk menolong kelompok-kelompok tertentu keluar dari kemiskinan. Pendukung program-program ini yakin bahwa hal ini akan membuat perekonomian berjalan lebih efisien dan menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan sehubungan perekonomian pasar yang senantiasa berubah.

Luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi, produksi yang dihasilkan dan cara pembangunan yang diterapkan apakah labour intensive atau capital intensive serta besarnya modal yang diinvestasikan. Lapangan kerja yang ada di negara-negara sedang berkembang (under developing countries) sangat terbatas akibat daripada kebijaksanaan investasi yang dilakukan pada masalah ditujukan kepada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan) demi kepentingan negara penjahaj, sedangkan lapangan kerja yang tercipta pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dari pertanian dan ekstraktip mineral

dari pertambangan yang proses produksinya pendek sehingga lapangan kerja yang tercipta sedikit.

Modal yang diinvestasikan relatif kecil sehingga perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri kecil-kecil akibatnya lapangan kerja yang tercipta sedikit. Situasi perekonomian Dunia yang tidak menentu sedangkan negara-negara sedang berkembang (*under developing countries*) sangat tergantung pada ekspor barang-barang produksi yang primer, yang harus diproses lebih lanjut supaya nilai pakai dan nilai tukarnya lebih besar.

Untuk memperluas lapangan kerja ini hendaknya proses produksi diperpanjang dengan jalan mendirikan beraneka ragam industri. Produksi primer dari sektor pertanian diolah menjadi barang jadi dengan mendirikan serangkaian pabrik. Untuk memperluas lapangan kerja ini negara sedang berkembang (*under developing countries*) mengalami kesulitan karena kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kurangnya perintis-perintis wiraswasta.

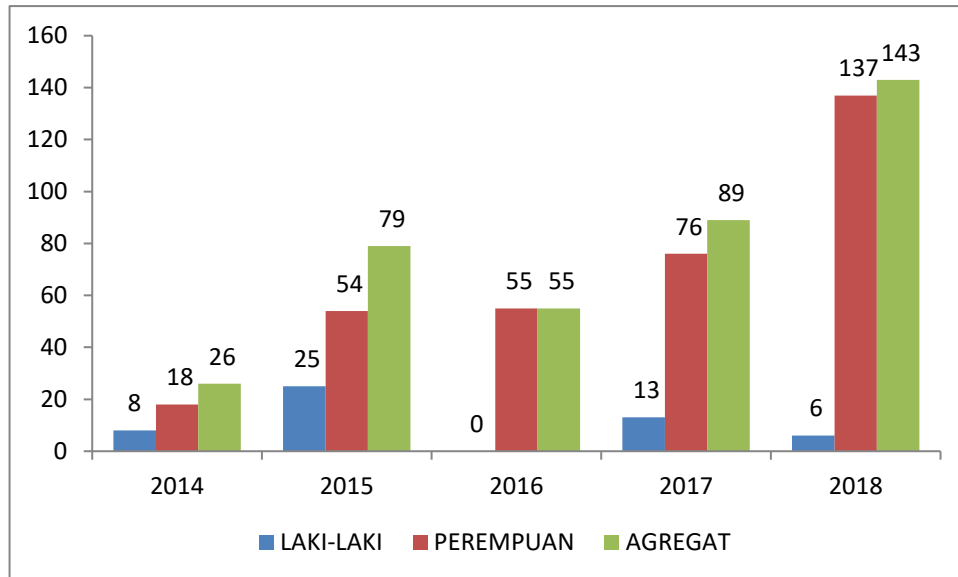
Lapangan kerja yang banyak adalah pada sektor perindustrian, karena itu hendaknya pemerintah membangun beraneka macam industri atau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun industri karena industrilah yang menjadi harapan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Sistem pembangunan yang diterapkan juga sangat mempengaruhi luasnya lapangan kerja. Jika pembangunan diterapkan secara *labourintensive* atau padat karya akan tercipta banyak lapangan kerja tetapi produktivitas, kualitas produksi yang dihasilkan rendah. Tetapi bila mana pembangunan yang diterapkan berdasarkan *capitalintensive* atau utama modal lapangan kerja yang tercipta sedikit, tetapi produktivitas dan kualitas produksi yang dihasilkan banyak serta baik mutunya.

Masalah perluasan tenaga kerja ini mutlak harus dilakukan bilamana hal ini tidak berhasil, maka akan timbul banyak pengangguran, kejahatan-kejahatan dan gejolak-gejolak sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan pemerintah.

a. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat

Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan, pada tahun 2014 perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki sebanyak 8 orang. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat laki-laki sebanyak 6

orang dan perempuan sebanyak 137 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat semakin meningkat. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

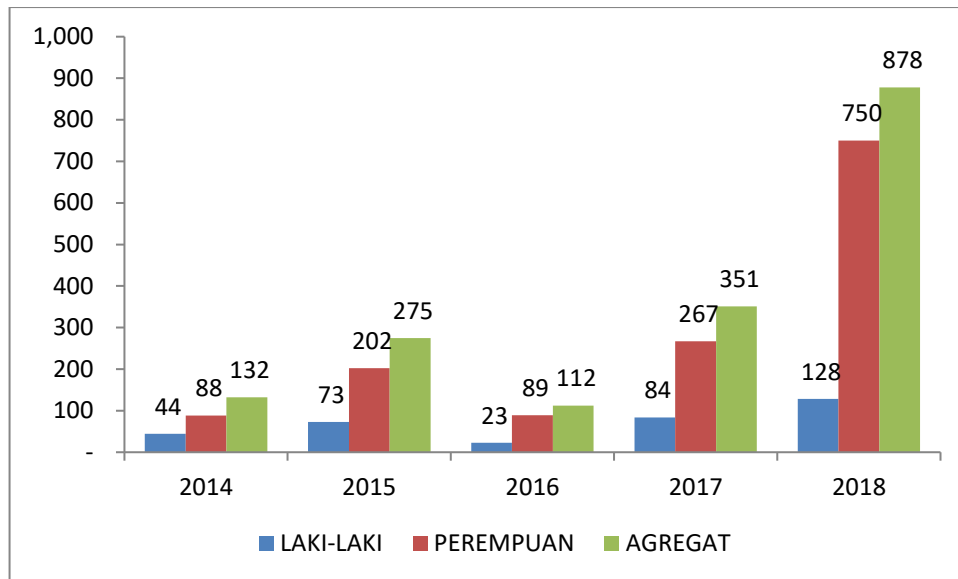


Sumber : Data Disnaker tahun 2019, diolah

Gambar 4.25 Jumlah Pecari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

b. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat

Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan, pada tahun 2014 perempuan sebanyak 88 orang dan laki-laki sebanyak 44 orang. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat laki-laki sebanyak 128 orang dan perempuan sebanyak 750 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat semakin meningkat. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

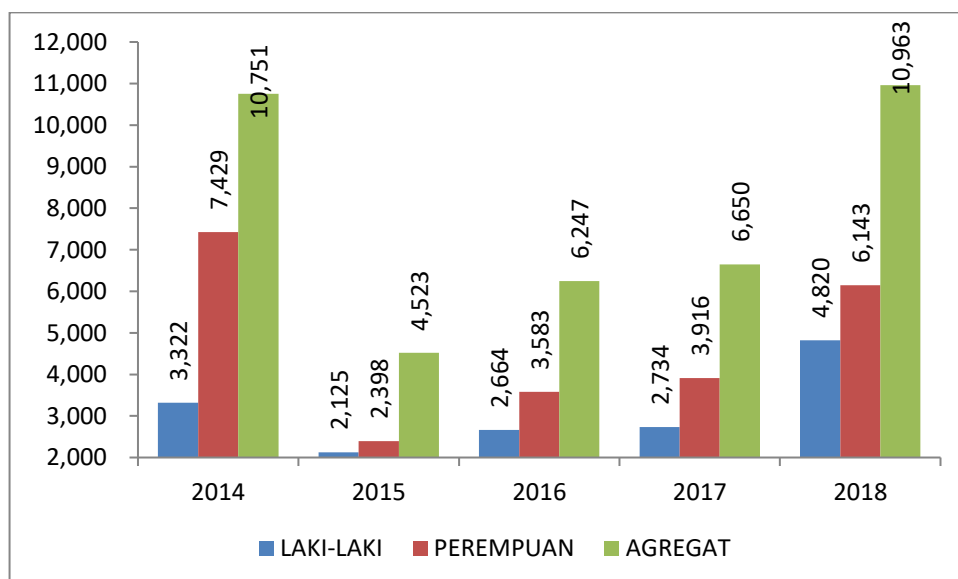


Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.26 Jumlah Pecari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

c. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat

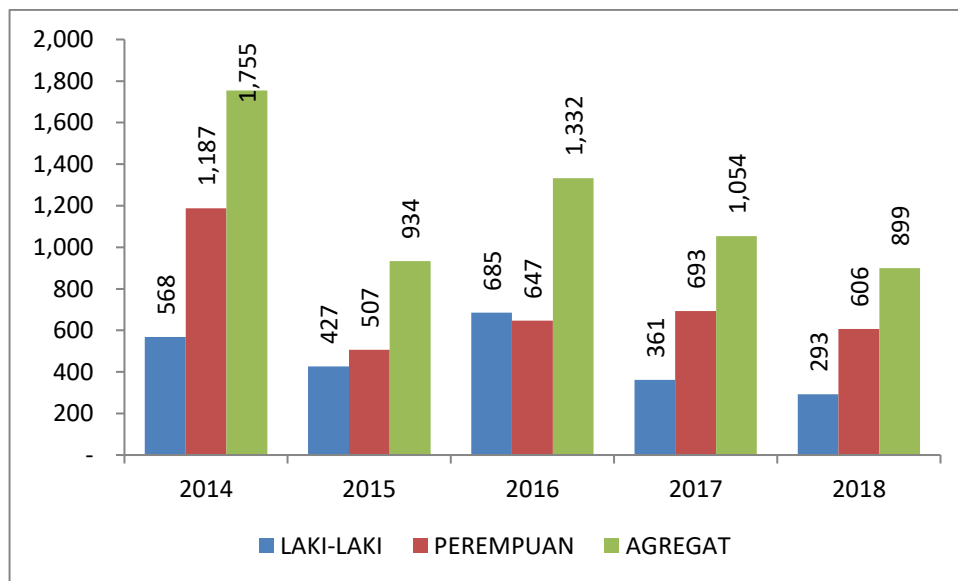
Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, jenis kelamin perempuan masih mendominasi, pada tahun 2014 perempuan sebanyak 7.429 orang dan laki-laki sebanyak 3.322 orang. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat laki-laki sebanyak 4.820 orang dan perempuan sebanyak 6.143 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat semakin meningkat. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.27 Jumlah Pecari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

d. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma

Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, jenis kelamin perempuan masih mendominasi, pada tahun 2014 perempuan sebanyak 1.187 orang dan laki-laki sebanyak 568 orang. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma laki-laki sebanyak 293 orang dan perempuan sebanyak 606 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma semakin turun. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

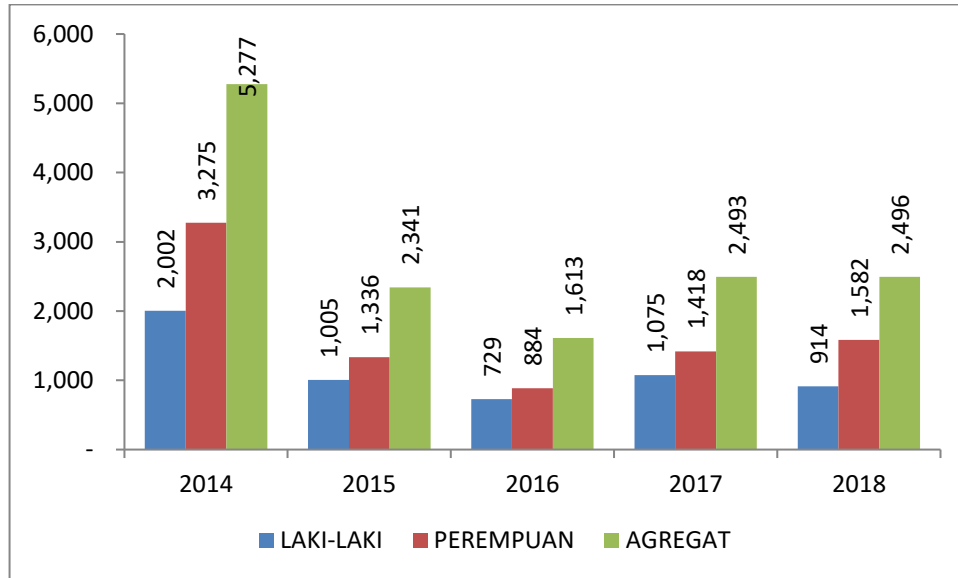


Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.28 Jumlah Pecari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

e. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3

Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, jenis kelamin perempuan masih mendominasi, pada tahun 2014 perempuan sebanyak 3.275 orang dan laki-laki sebanyak 2.002 orang. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 laki-laki sebanyak 914 orang dan perempuan

sebanyak 1.582 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 semakin turun, merupakan perkembangan yang positif. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

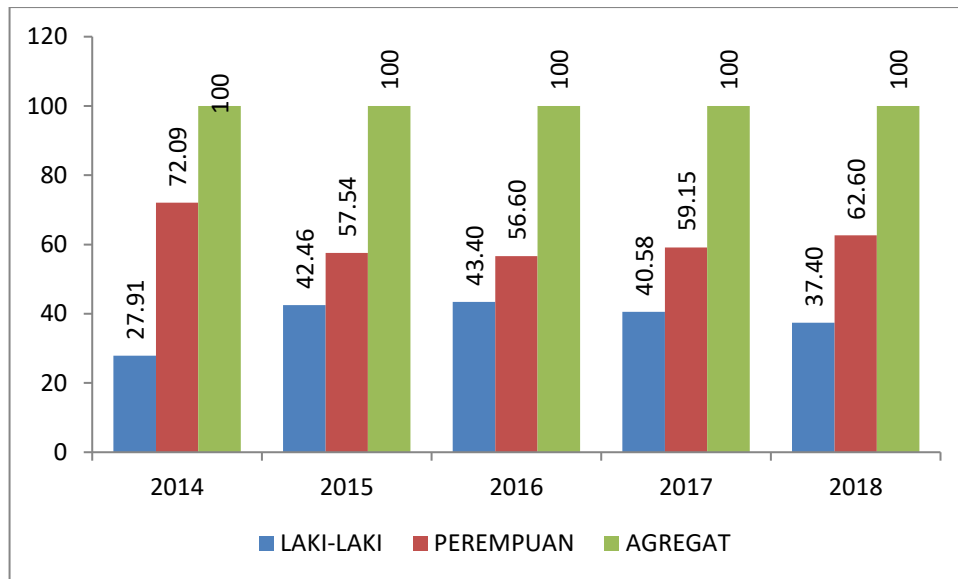


Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.29 Jumlah Pecari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3 di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

f. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kota Semarang pada tahun 2014-2018, jenis kelamin perempuan masih mendominasi, pada tahun 2014 perempuan sebesar 72,09 % dan laki-laki sebesar 27,91 %. Pada tahun 2018 persentase pencari kerja yang ditempatkan laki-laki sebesar 37,40 % dan perempuan sebesar 62,60. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja yang ditempatkan semakin meningkat, merupakan perkembangan yang positif. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.



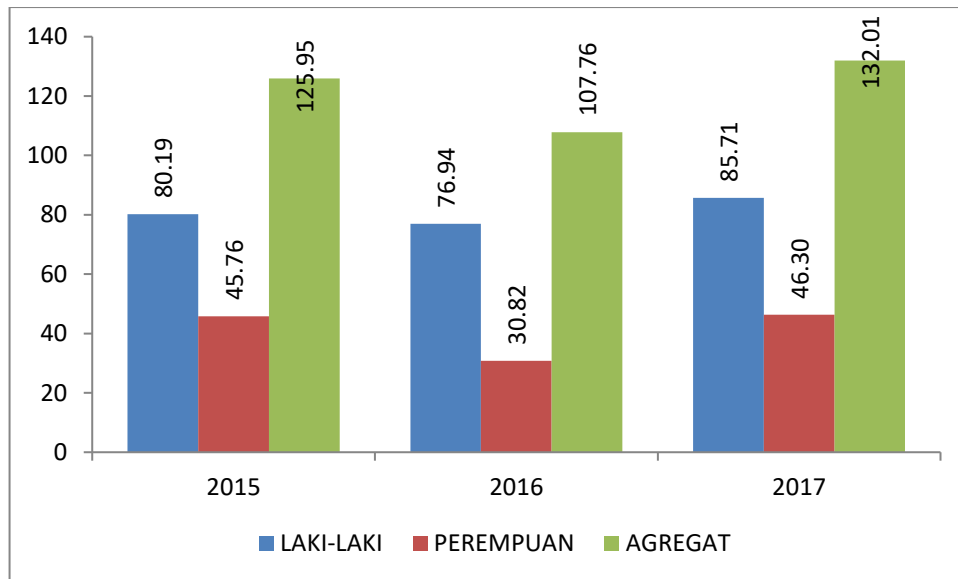
Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.30 Persentase Pecari Kerja yang Ditempatkan di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (%)

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

TPAK Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun menjadi mengalami peningkatan, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu pada tahun 2015 laki-laki sebesar 80,19 % dan perempuan sebesar 45,76 %, kemudian pada tahun 2017 capaian TPAK laki-laki sebesar 85,71 % dan perempuan sebesar 46,30 %.

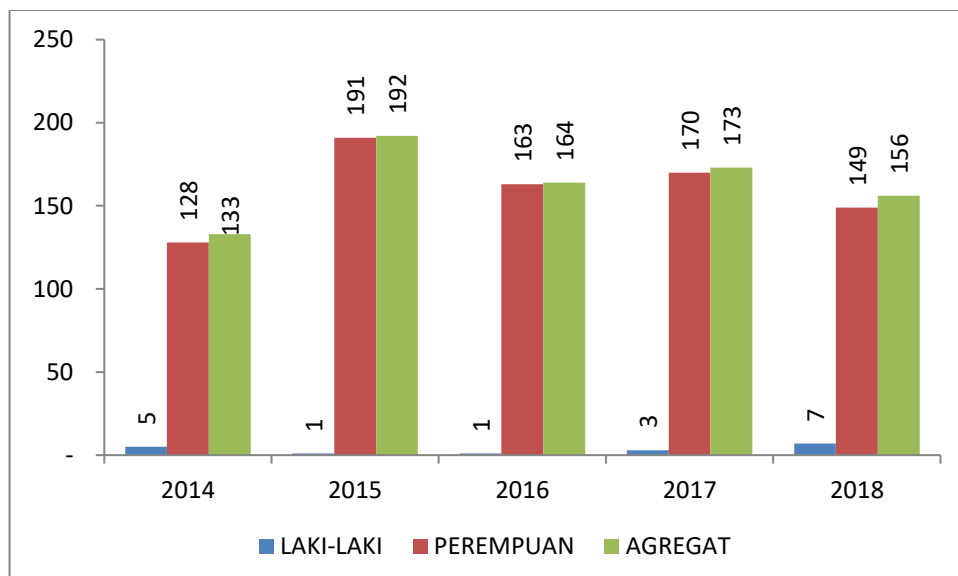


Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2015-2017 (%)

3. Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara

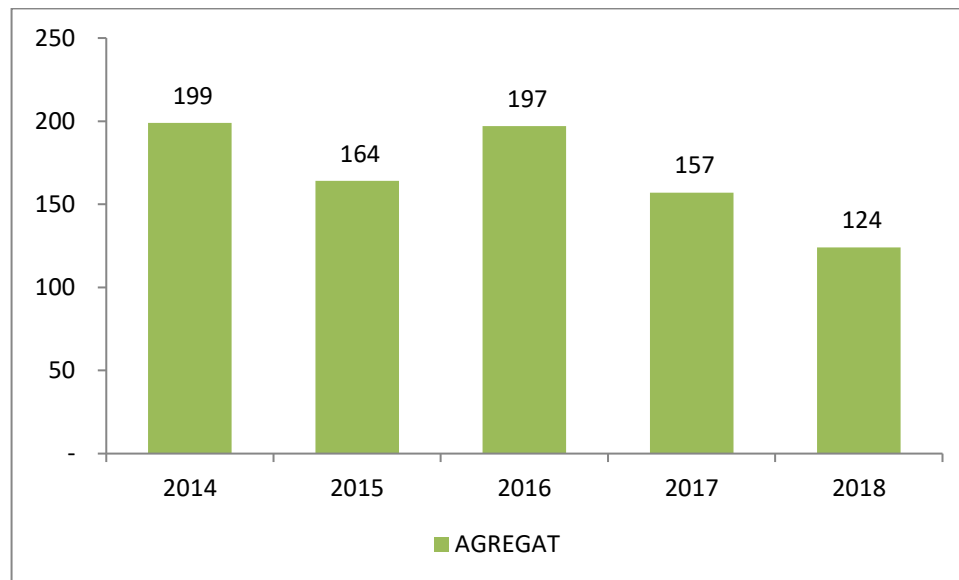
Jumlah angkatan kerja antar negara di Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun menjadi mengalami peningkatan yang fluktuaktif, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu pada tahun 2014 laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 128 orang dengan agregat 133 orang, kemudian pada tahun 2015 capaian jumlah tenaga kerja antar negara meningkat laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 191 orang dengan agregat 192 orang, lalu pada tahun 2018 menurun laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 149 dengan agregat 156 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.32 Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

4. Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK

Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun menjadi mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 199 Orang, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 124 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan pengurangan tenaga kerja di Kota Semarang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat gambar di bawah ini.



Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.33 Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

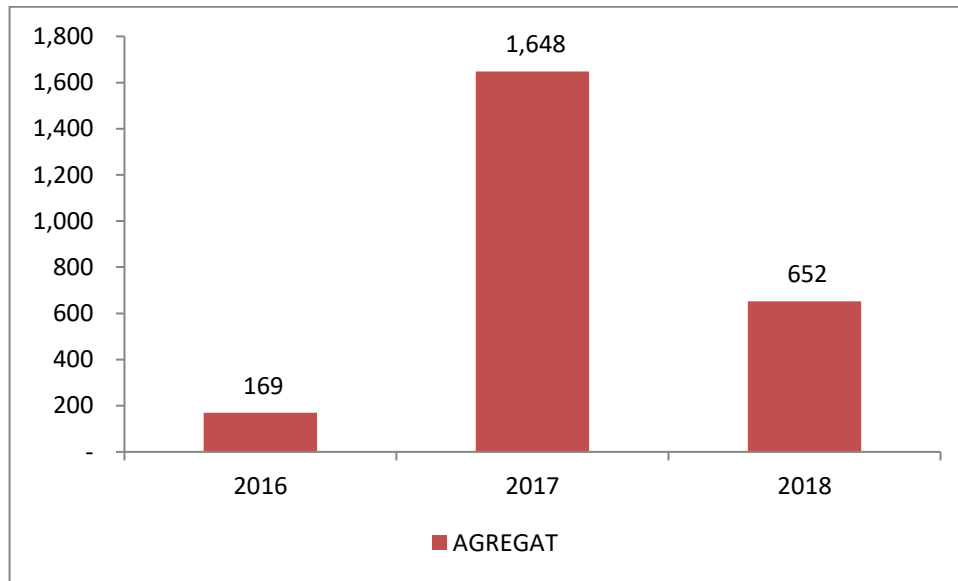
5. Jumlah Anggota Serikat Pekerja

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Jumlah anggota serikat pekerja di Kota Semarang pada tahun 2016-2018 mengalami naik turun, yaitu di tahun 2016 sebanyak 169 orang dan pada tahun 2017 naik menjadi sebanyak 1.648 orang dan kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sebanyak 652 orang. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.

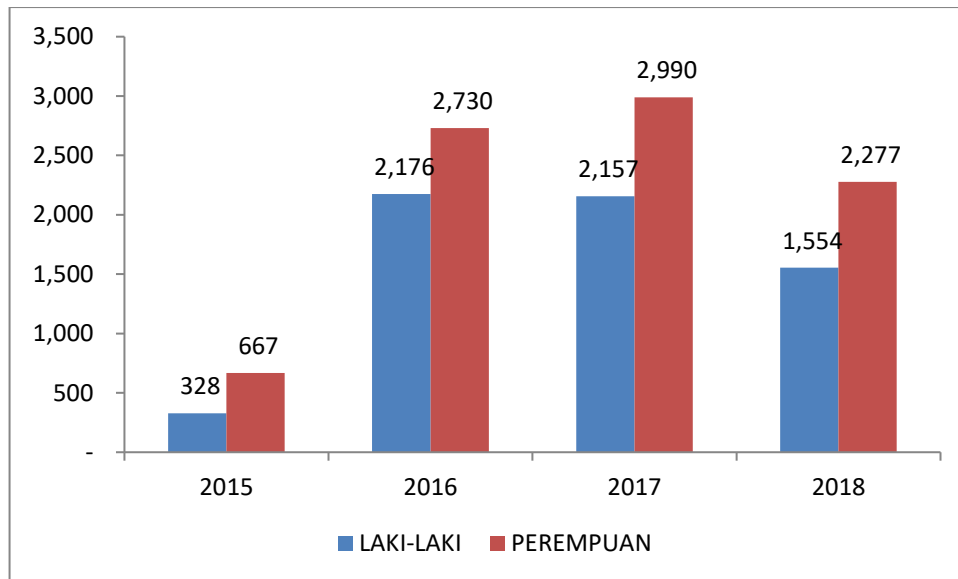


Sumber : Data Disnaker Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.34 Jumlah Anggota Serikat di Kota Semarang Tahun 2016-2018 (Orang)

6. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

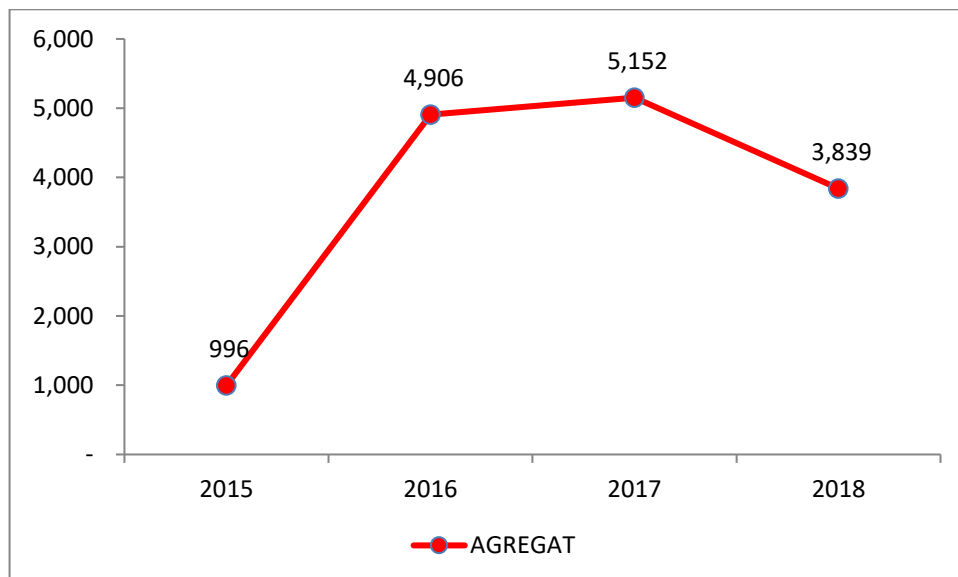
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Semarang pada tahun 2015-2018 mengalami naik turun, baik laki-laki dan perempuan, yaitu di tahun 2015 sebanyak 328 orang laki-laki dan 667 orang perempuan, pada tahun 2016 naik menjadi sebanyak 2.176 orang laki-laki dan sebanyak 2.730 orang perempuan, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sebanyak 1.554 orang laki-laki dan 2.277 orang perempuan. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Koperasi Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.35 Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang Tahun 2015-2018 (Orang)

7. Jumlah UMKM yang Memiliki Ijin

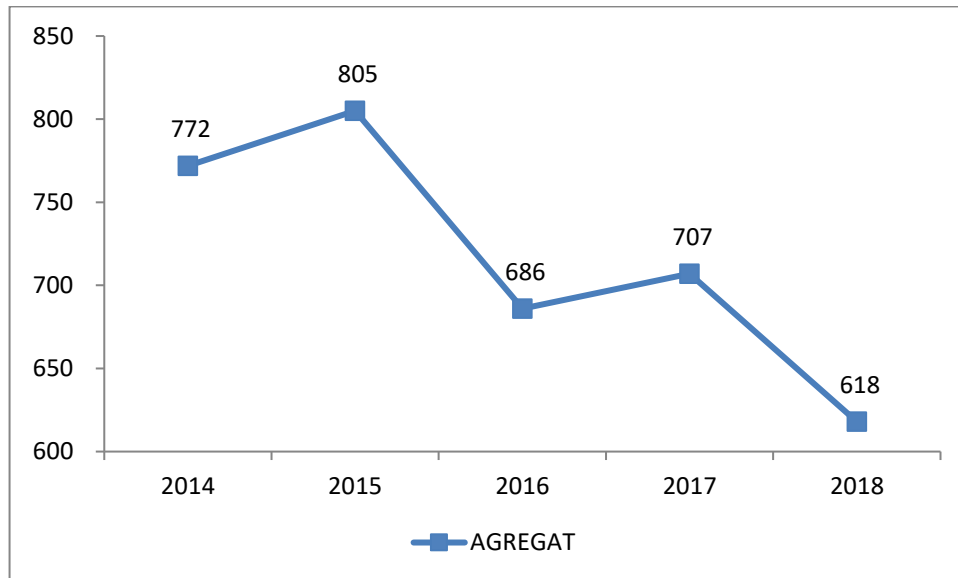
Jumlah umkm yang memiliki ijin di Kota Semarang pada tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang fluktuaktif, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 998 unit, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 4.906 unit, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 3.839 unit. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Koperasi Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.36 Jumlah UMKM yang Memiliki Ijin di Kota Semarang Tahun 2015-2018 (Unit)

8. Jumlah Koperasi Aktif

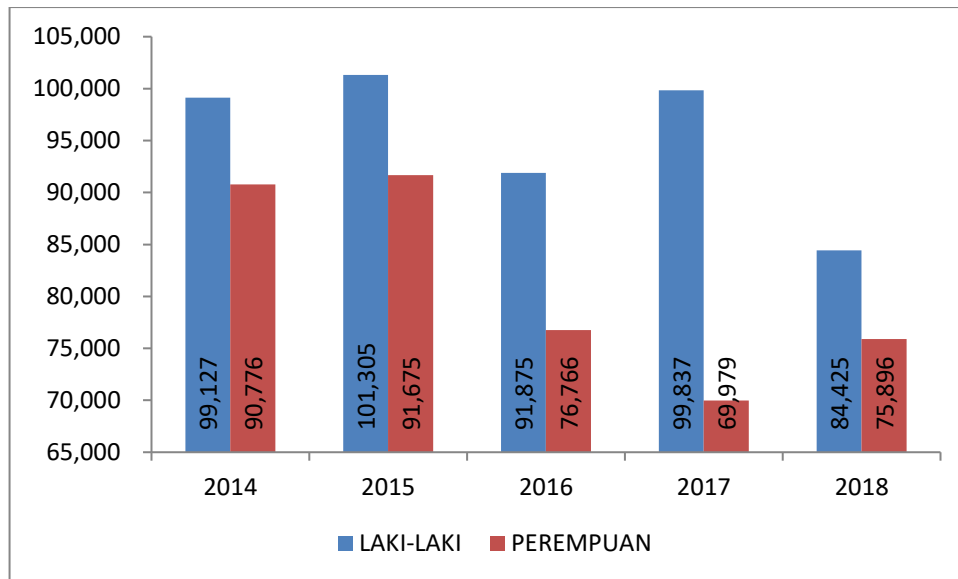
Jumlah koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 772 unit, pada tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 805 unit, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 168 unit. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Koperasi Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.37 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Unit)

a. Jumlah Anggota Koperasi Aktif

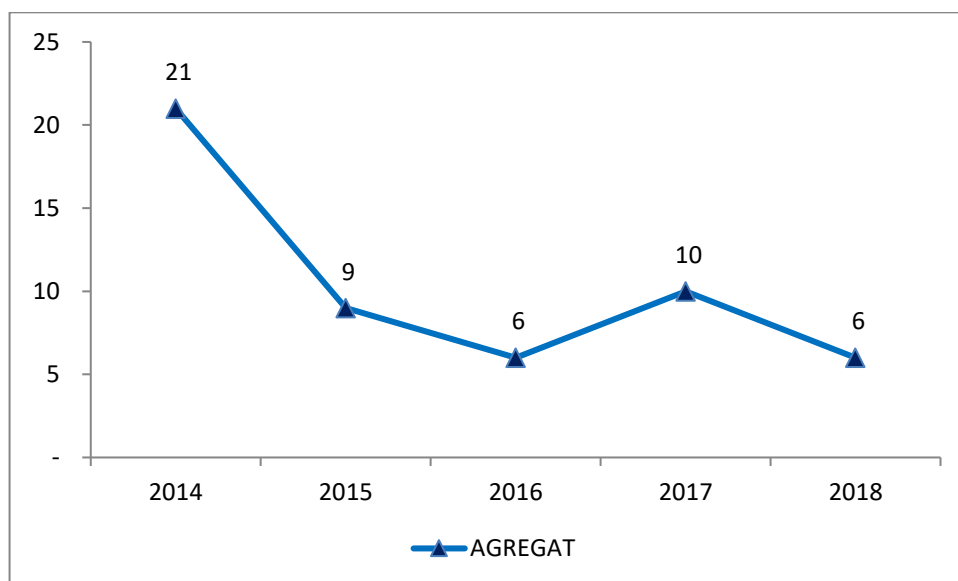
Jumlah anggota koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 99.127 orang laki-laki dan 90.776 orang perempuan, pada tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 101.305 orang laki-laki dan 91.675 orang perempuan, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 84.425 orang laki-laki dan 75.896 orang perempuan. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Koperasi Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.38 Jumlah Anggota Koperasi Aktif di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Orang)

b. Jumlah Koperasi Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan

Jumlah koperasi penerima kredit dari lembaga keuangan di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 21 unit, pada tahun 2015 menurun menjadi sebanyak 9 unit, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 10 unit dan pada tahun 2018 menurun kembali menjadi sebanyak 6 unit. Selengkapnya ada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Koperasi Kota Semarang tahun 2019, diolah

**Gambar 4.39 Jumlah Koperasi Penerima Kredit dari Lembaga
Keuangan di Kota Semarang Tahun 2014-2018
(Unit)**

9. Jumlah Penghuni Los Pasar

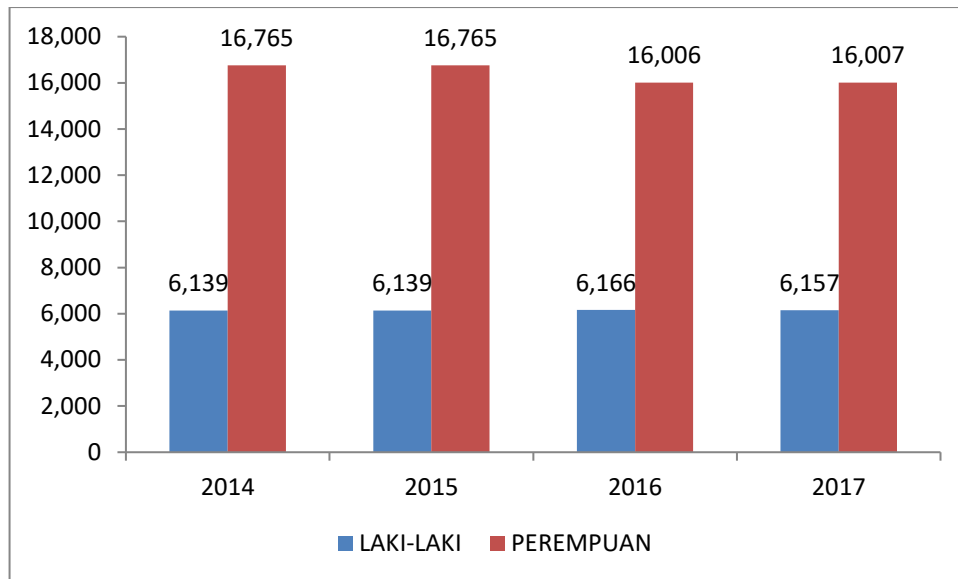
Kemampuan perempuan dalam kewirausahaan merupakan tolok ukur dalam memberikan tambahan pendapatan ekonomi bagi keluarga. Perempuan yang melakukan kegiatan wirausaha menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam perekonomian sehingga perannya kini semakin strategis dan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Salah satu aktivitas perekonomian yang dilakukan perempuan dilakukan di pasar tradisional. Pasar tradisional telah menjadi pusat perekonomian masyarakat semenjak lama dan memainkan peran yang cukup besar dalam roda perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Setidaknya terdapat 52 pasar tradisional di Kota Semarang yang tersebar di seluruh kecamatan dan memainkan peran penting dalam menggerakkan distribusi barang di Kota Semarang. Pasar tradisional menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial, budaya, bahkan politik suatu masyarakat. Dalam perkembangan pasar tradisional, perempuan memiliki peran yang signifikan. Konstruksi gender yang melekat pada perempuan melatarbelakangi lahirnya berbagai peran penting tersebut, baik sebagai pembeli, penjual, maupun sebagai produsen yang memasok barang ke pasar.

Peran tersebut hingga saat ini masih belum bergeser. Perempuan memiliki kendali terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Mulai dari penentuan harga, jenis barang yang dijual, hingga pada ke mana barang tersebut akan didistribusikan, serta aktivitas lainnya. Secara kuantitas, perempuan merupakan mayoritas dan menempati seluruh lapisan struktur di pasar tradisional, dari yang terendah hingga tertinggi, termasuk perempuan produsen yang menggunakan pasar tradisional untuk memasarkan hasil produksinya. Kondisi ini tercermin dari jumlah penghuni los pasar di Kota Semarang didominasi oleh perempuan, yaitu dengan proporsi 72,22%. Tingginya jumlah pedagang di sektor perdagangan melalui pasar tradisional menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, baik dalam hal wirausaha maupun terkait dengan bidang lainnya.

Keberadaan perempuan yang banyak di pasar tradisional juga memberikan konsekuensi bagi pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan secara baik dan layak. Ketersediaan serta kelayakan infrastruktur yang mendukung terhadap pemenuhan hak perempuan adalah salah satunya. Perempuan memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan laki-laki khususnya dalam hal sanitasi organ reproduksi. Perempuan membutuhkan toilet yang bersih agar dapat menjaga kebersihan serta kesehatan organ reproduksi. Kendati sudah banyak pasar yang telah menyediakan toilet bersih, akan tetapi masih banyak pula pasar tradisional yang belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan tersebut. Baik dari sisi ketersediaan toilet maupun kualitas dari toilet itu sendiri.

Selain dari sisi pemenuhan hak kesehatan perempuan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan hak perempuan untuk dapat mengakses pasar dengan mudah, aman dan nyaman. Pemenuhan tersebut dapat dilihat apabila dalam pembangunan pasar telah memperhatikan struktur bangunan yang ramah perempuan, seperti tingkat kelandaian anak tangga, ketersediaan pegangan pada akses masuk, maupun tinggi pondasi bangunan yang mudah untuk diakses oleh perempuan maupun disabilitas sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Perempuan yang bekerja di sektor perdagangan, utamanya di pasar tradisional, masih menghadapi berbagai kendala antara lain terbatasnya akses sumber daya keuangan dan modal, akses untuk mendapatkan informasi tentang produk atau pasar, dan akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan wirausaha. Kondisi ini perlu untuk diselesaikan agar perempuan yang berdagang di pasar dapat melakukan kegiatan perekonomian secara baik dan optimal. Secara rinci jumlah pedagang perempuan yang menghuni los pasar di Kota Semarang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Data Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2019, diolah

Gambar 4.40 Jumlah Penghuni Los Pasar di Kota Semarang Tahun 2014-2017 (Orang)

D. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

1. Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang

Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Semarang masih perlu untuk ditingkatkan. Kondisi ini tercermin dari jumlah anggota DPRD yang berjumlah 12 orang dari 50 anggota DPRD. Dari perbandingan jumlah kursi legislatif, jumlah keterwakilan perempuan Indonesia di Lembaga pembuat kebijakan tidak mencapai angka 30 persen seperti yang diharapkan atau baru mencapai 24% dari total anggota DPRD. Studi dari MacManus pada 1992 tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik menunjukkan rendahnya jumlah kandidat perempuan dalam kontestasi politik, antara lain pileg, menjadi faktor utama sedikitnya perempuan menduduki jabatan strategis politik. Kondisi ini berbanding balik dengan kondisi ideal dimana dalam pembangunan, utamanya di ranah legislatif, keberadaan perempuan dapat memberikan nuansa dan warna yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh dua hal utama, yaitu: Pertama, dari segi jumlah penduduk, perempuan mencapai lebih dari 50 persen penduduk Kota Semarang. Tingginya jumlah penduduk perempuan tersebut memerlukan dukungan untuk mewakili kepentingan mereka dalam pengambilan kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan perempuan itu sendiri. Isu ramah perempuan seperti lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, studi lainnya tentang keterwakilan perempuan dalam politik menunjukkan bahwa bertambahnya

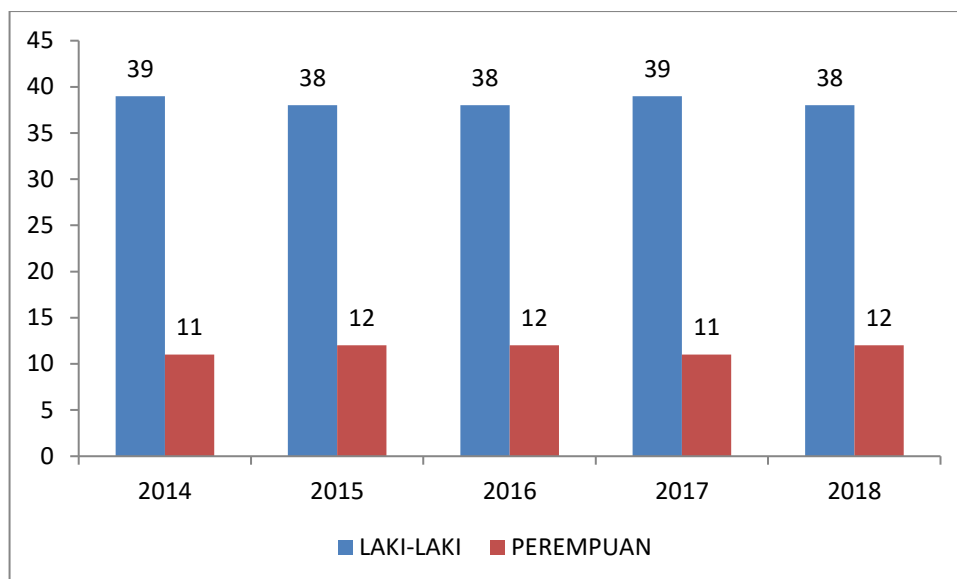
jumlah perempuan dalam daftar caleg akan berkontribusi besar dalam meningkatnya partisipasi politik perempuan secara keseluruhan.

Keterwakilan caleg perempuan dalam perempuan diharapkan lebih banyak bila jumlah caleg perempuan terdaftar dalam surat suara meningkat. Sayangnya, caleg perempuan menghadapi tantangan lebih banyak dibandingkan caleg laki-laki. Pertama, masyarakat kita masih patriarkal. Artinya masyarakat Indonesia kebanyakan masih menganut nilai tradisional di mana laki-laki adalah yang paling layak menjadi pemimpin baik di rumah tangga, apalagi di ruang publik semacam parlemen.

Kedua, Indonesia tidak memiliki mekanisme memaksa parpol memenuhi ketentuan 30 persen kuota caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Akibatnya, caleg perempuan akan menghadapi kesulitan, mulai dari menunjukkan hasrat keinginan tampil sebagai caleg, mengikuti proses seleksi, sampai kemudian mendapatkan dukungan pendanaan dalam kampanye dari parpol.

Ketiga, masyarakat akan lebih kritis menilai caleg perempuan daripada caleg laki-laki. Caleg perempuan selain harus menampilkan karakter dan keberpihakan terhadap perempuan juga harus memiliki militansi layaknya caleg laki-laki.

Keempat, caleg perempuan yang tidak berafiliasi terhadap dinasti politik, organisasi massa, ataupun pemodal besar, akan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan. Ini faktor yang harus diubah dalam perpolitikan Indonesia. Perjuangan caleg perempuan miskin dana dan jejaring perlu mendapatkan sorotan lebih dari masyarakat agar dapat masuk dalam jajaran bursa caleg perempuan bergengsi dan diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan perempuan melalui penyusunan kebijakan yang responsif gender dan anak. Guna mengatasi permasalahan diatas, Pendidikan politik perempuan harus mampu mencapai level akar rumput perempuan. Organisasi-organisasi seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia, lembaga swadaya masyarakat harus bergerak untuk mengubah stigma yang saat ini telah berkembang di masyarakat.



Sumber : Data Sekretariat Dewan Kota Semarang tahun 2019, diolah
Gambar 4.41 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2018 (orang)

Jenjang golongan dan eselon jabatan, secara sosial kultural menjadi indikator status dan peran. PNS yang menduduki eselon rendah disimbolkan dengan angka romawi besar, dan PNS eselon tinggi disimbolkan angka romawi kecil. Hal ini berbeda dengan simbol golongan, semakin tinggi golongan, maka akan menggunakan simbol angka romawi yang lebih tinggi. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. Di pemerintahan, tingkatan atau level tertinggi berada pada posisi eselon I (satu) sebagai *top management*, terus berjenjang ke bawah hingga level *lower management* yakni eselon IV (empat).

Jika dilihat dari data yang ada, dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah pejabat mulai dari eselon II sampai eselon IV di Kota Semarang selalu lebih banyak laki-laki jika dibandingkan perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2014-2018

Pejabat/Pegawai	Tahun			
	2017		2018	
	L	P	L	P
Pejabat Eselon II	33	8	28	7
Pejabat Eselon III	157	56	154	54
Pejabat Eselon IV	934	757	865	756
Jumlah	1.124	821	1.047	817

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 2019

Selain eselonisasi, dalam kepegawaian di pemerintahan juga dikenal istilah penggolongan dan pengelompokan ruang kerja PNS. Penggolongan dan pengelompokan ruang ini ditandai dengan nama IV/D, III/C, II/A, I/B, dan sebagainya sesuai dengan jabatan yang diemban. Hal ini biasanya juga berbanding lurus dengan masa kerja yang telah ditempuh. Pada tahun 2018 jumlah PNS laki-laki mendominasi di golongan I dan II, adapun Golongan II dan IV justru didominasi oleh PNS perempuan.

Tabel 4.2
Jumlah Pejabat Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2017-2018

Jumlah PNS	2017		2018	
	L	P	L	P
Golongan I	167	18	118	14
Golongan II	1.347	655	1158	447
Golongan III	2.400	3.383	2.307	3.462
Golongan IV	1.179	2.323	1.060	2.095

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 2019

Tingkat pendidikan PNS di Kota Semarang tahun 2018 sangat beragam, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Strata Tiga (S3). Tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Master (S2), dan Doktor (S3) jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebanyak 6.277 orang (laki-laki: 2.449, dan perempuan: 3.828) disusul kemudian tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 2.132 orang (laki-laki: 576; perempuan: 1.344). Secara keseluruhan, PNS laki-laki berpendidikan SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk lulusan Diploma dan Perguruan Tinggi justru lebih banyak PNS perempuan dibandingkan laki-laki. Selengkapnya PNS berdasarkan tingkat pendidikan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2017-2018

Pendidikan	2017		2018	
	L	P	L	P

Pendidikan	2017		2018	
	L	P	L	P
SD Sederajat	162	6	106	6
SMP Sederajat	287	38	196	24
SMA Sederajat	1402	810	1316	816
Diploma	516	1.073	576	1.344
S1/S2/S3	2.726	4.452	2.449	3.828

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 2019

E. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

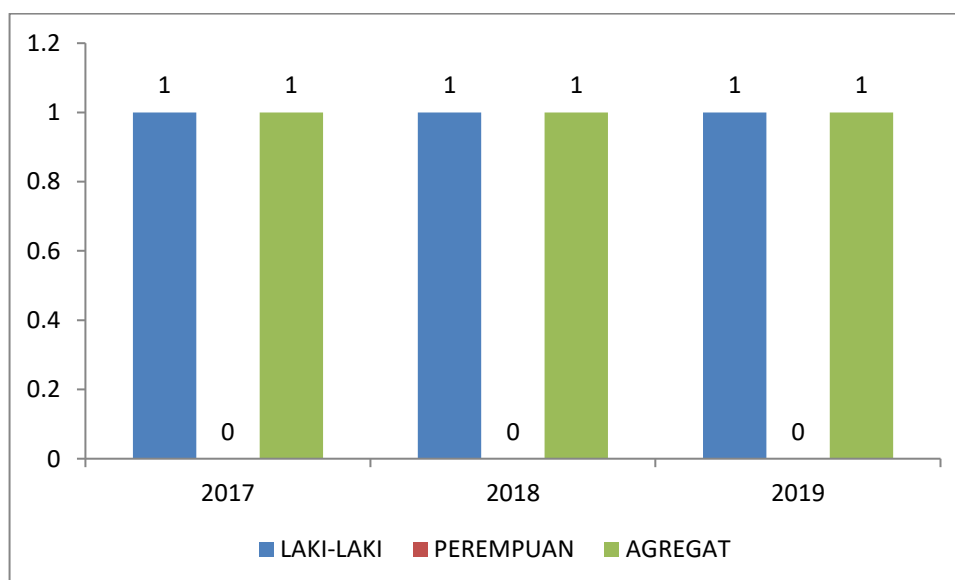
1. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

a. Jumlah Kepala Polres/Polrestabes (Kepolisian)

"Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor(Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).

Jumlah Kepala Resor Kota Besar Semarang dari tahun 2017 hingga tahun 2019 hanya dikepalai orang satu orang berjenis kelamin laki-laki.



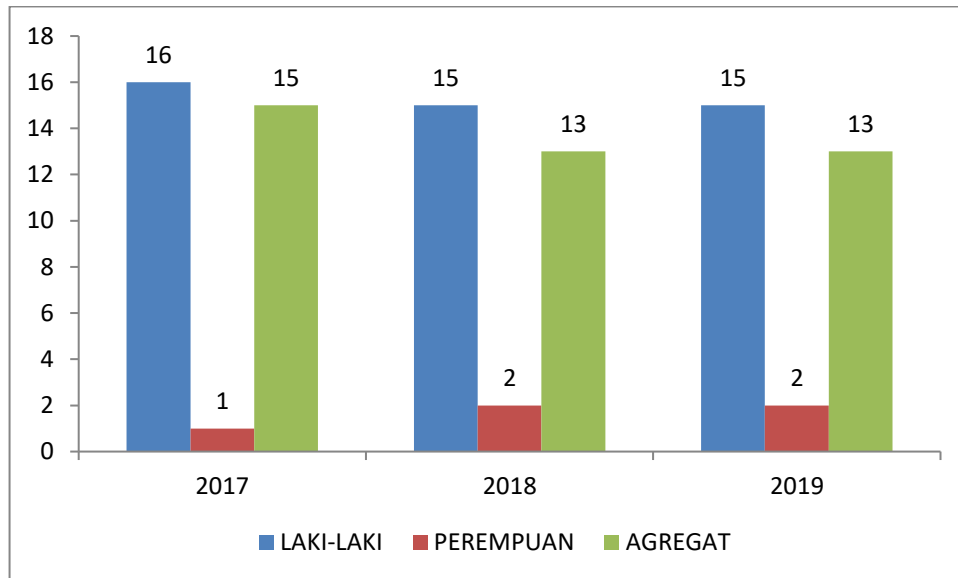
Sumber : Data Kepolisian 2019, diolah

Gambar 4.42 Jumlah Kapolrestabes Semarang Tahun 2017-2019 (orang)

b. Jumlah Polisi Kepala Sektor (Kepolsek)

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta).

Jumlah Kapolsek di Kota Semarang pada tahun 2017-2019, didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2017 laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan 1 orang. Pada tahun 2019 jumlah Kapolsek perempuan menjadi 2 orang dan laki-laki sebanyak 15 orang. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

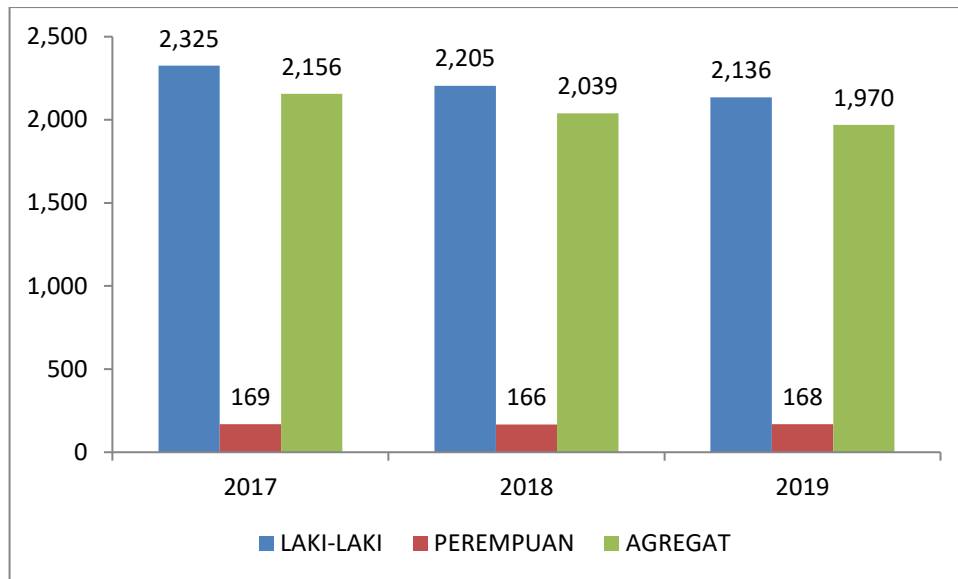


Sumber : Data Kepolisian 2019, diolah

Gambar 4.43 Jumlah Kapolsek Kota Semarang Tahun 2017-2019 (Orang)

c. Jumlah Polisi di Wilayah Polres

Jumlah polisi di wilayah Polres Kota Semarang pada tahun 2017-2019, masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2017 laki-laki sebanyak 2.325 orang dan perempuan 169 orang. Pada tahun 2019 jumlah polisi laki-laki sebanyak 2.136 orang dan perempuan sebanyak 168 orang. Dari tiga tahun terakhir menunjukkan data yang menurun. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.

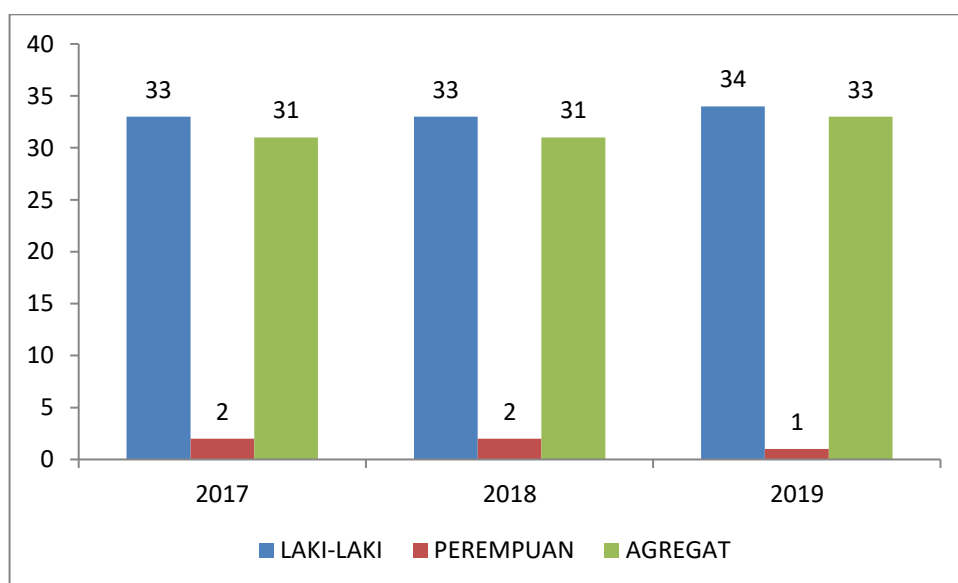


Sumber : Data Kepolisian 2019, diolah

Gambar 4.44 Jumlah Polisi di Wilayah Polres Kota Semarang Tahun 2017-2019 (Orang)

d. Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres

Jumlah pejabat polisi di wilayah Polres Kota Semarang pada tahun pada tahun 2017-2019, masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2017 laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan 2 orang. Pada tahun 2019 jumlah pejabat polisi laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Dari data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data Kepolisian 2019, diolah

Gambar 4.45 Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres Kota Semarang Tahun 2017-2019 (Orang)

2. Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai 1.754 orang, terdiri dari 978 laki-laki dan 776 perempuan, yang terdiri dari beragam jenis disabilitas yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda (cacat fisik dan mental). Permasalahan penyandang cacat timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Keberadaan penyandang disabilitas di Kota Semarang tersebar diseluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Semarang Utara yang mencapai 245 orang, terdiri dari 129 laki-laki dan 116 perempuan. Permasalahan penyandang cacat timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Ketersediaan data tentang penyandang disabilitas berguna sebagai dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan disabilitas. Pemenuhan tersebut antara lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan; pemenuhan kebutuhan sekunder seperti alat penunjang aktivitas difabel seperti alat berjalan, kaki palsu, kursi roda maupun alat bantu dengan; maupun penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas tentang keterampilan kerja.

Selain Pemerintah Kota Semarang, terdapat beberapa lembaga non pemerintah yang berkecimpung dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang, antara lain Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Semarang. Penanganan penyandang cacat di YPAC Semarang meliputi: rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan vokasional. Perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin dan persebaran di kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin dan
Persebaran Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Semarang Utara	129	116	245
2	Semarang Selatan	101	79	180
3	Semarang Tengah	65	64	129
4	Semarang Barat	73	77	150
5	Semarang Timur	72	42	114
6	Tembalang	122	85	207
7	Candisari	35	21	56
8	Mijen	33	27	60
9	Gajah Mungkur	46	34	80
10	Banyumanik	61	35	96
11	Tugu	41	28	69
12	Genuk	11	13	24
13	Gayamsari	42	49	91
14	Pedurungan	5	8	13
15	Gunungpati	73	48	121
16	Ngaliyan	69	50	119
	Jumlah	978	776	1.754

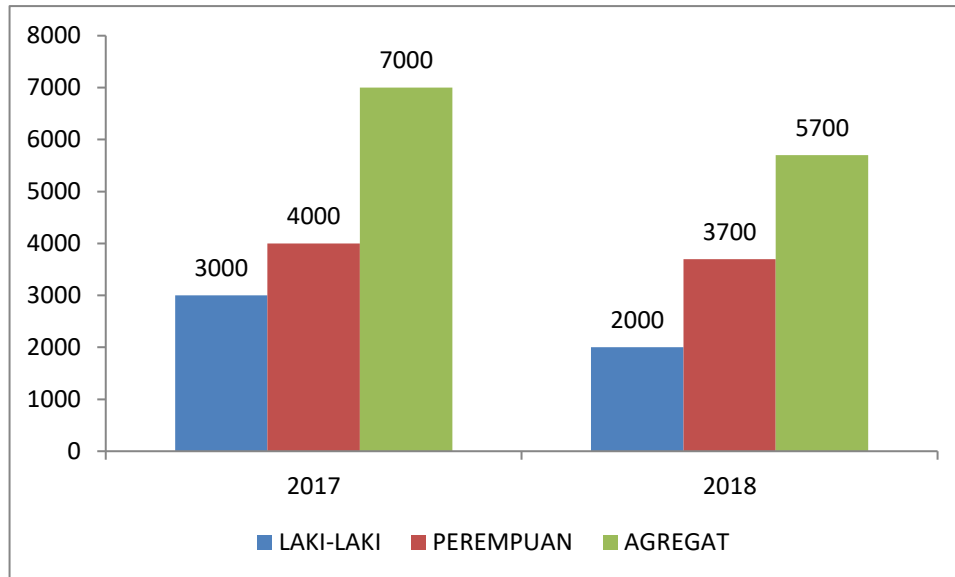
Sumber : Data Dinas Sosial 2019, diolah

3. Jumlah Korban Bencana Alam

Kota Semarang memiliki berbagai kerawanan bencana, terlebih memasuki musim penghujan. Berdasarkan pemetaan wilayah rawan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, sedikitnya ada lima jenis bencana yang menghantui masyarakat Kota Semarang. Kelima jenis bencana tersebut, masing-masing: banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran dan kekeringan. Berdasarkan pemetaan wilayah rawan bencana oleh BPBD Kota Semarang, sedikitnya ada 9 kecamatan rawan longsor. Yakni Gajahmungkur, Gunungpati, Candisari, Ngaliyan, Tugu, Tembalang, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Banyumanik. Adapun daerah rawan puting beliung berada di 10 kecamatan, yakni Gunungpati, Candisari, Gayamsari, Genuk, Ngaliyan, Tugu, Tembalang, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur. Sementara untuk daerah rawan banjir berada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Candisari, Gunungpati, Gayamsari, Pedurungan, Tembalang, dan Genuk.

Jumlah total kasus bencana di Kota Semarang pada 2018 mencapai 70 kasus yang terdiri dari berbagai macam jenis bencana antara lain kebakaran, longsor, pohon tumbang, banjir, erosi air sungai yang menyebabkan longsor,

serta beberapa jenis bencana lainnya. Ketika musim penghujan tiba, kejadian bencana didominasi banjir, tanah longsor dan puting beliung. BPBD Kota Semarang mencatat setidaknya terjadi 43 bencana di Kota Semarang utamanya tentang tiga jenis bencana diatas. Jumlah penyintas bencana di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai 5.700 orang, terdiri dari 2.000 korban laki-laki dan 3.700 korban perempuan.

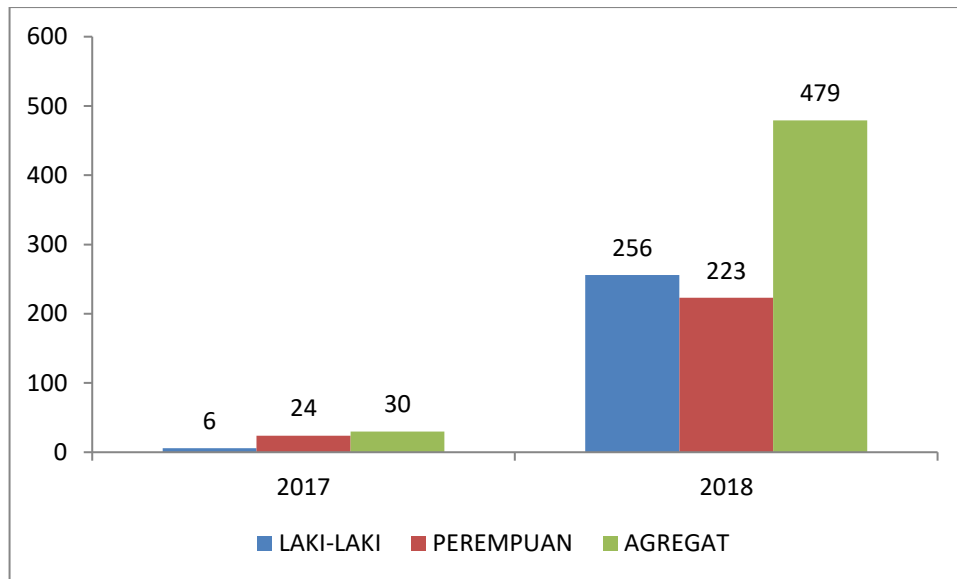


Sumber : Data Dinas Sosial tahun 2019, diolah

Gambar 4.46 Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres Kota Semarang Tahun 2017-2018 (Orang)

4. Jumlah Korban Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Potensi kerusuhan sosial sebagai sebuah bencana sosial karena adanya faktor keberagaman masyarakat Kota Semarang baik status sosial, ekonomi, dan budaya. Jumlah korban bencana sosial di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai 479 jiwa, terdiri dari 256 laki-laki dan 223 perempuan.

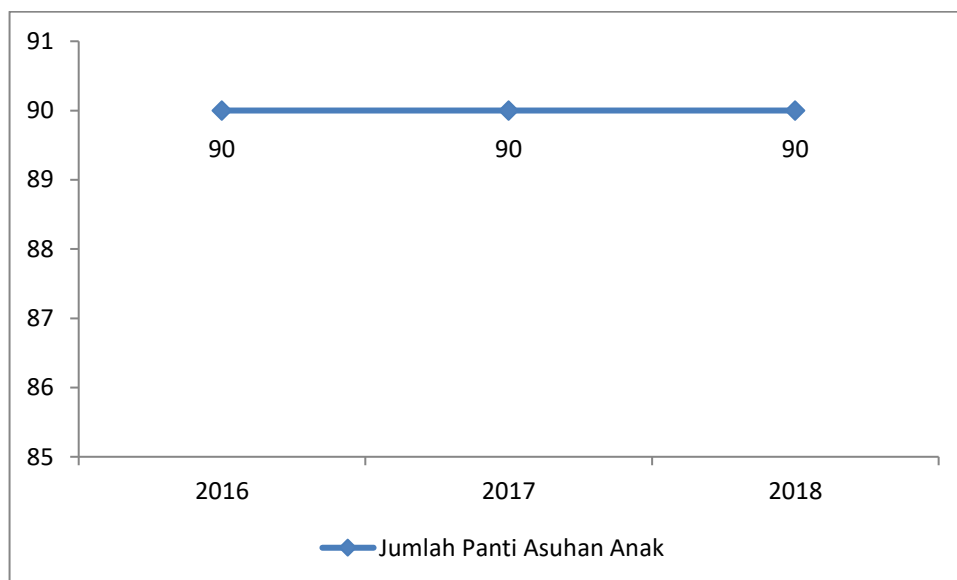


Sumber : Data Dinas Sosial tahun 2019, diolah

Gambar 4.47 Jumlah Korban Bencana Sosial Kota Semarang Tahun 2017-2018 (Orang)

5. Jumlah Panti Asuhan Anak

Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Jumlah panti asuhan di Kota Semarang pada tahun 2018 sebanyak 80 panti asuhan yang terdiri dari 2 panti asuhan milik pemerintah dan 78 panti asuhan milik swasta.



Sumber : Data Dinas Sosial tahun 2019, diolah

Gambar 4.48 Jumlah Panti Asuhan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2018 (Unit)

6. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur.

Kata keras apabila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain³. Definisi mengenai kekerasan dari KBBI tersebut sejalan dengan definisi dari Stuart dan Sundeen (1998) yang menyatakan bahwa kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan⁴. Adapun definisi kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.

Stuart dan Sundeen menjelaskan bahwa kekerasan muncul akibat dari menurunnya harga diri dari seseorang; baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal⁵. Dari sisi faktor eksternal, adanya sosialisasi manusia yang berjalan dengan tidak harmonis dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Disharmonisasi yang dimaksud antara lain terjadinya bully, kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dari sisi faktor internal, permasalahan yang menyulut terjadinya dorongan untuk melakukan kekerasan adalah adanya perasaan tertekan terhadap pencapaian diri, dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Seseorang yang gagal dalam mencapai hal yang diinginkan akan lebih emosional dan berpotensi lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui www.kbbi.web.id

⁴ Stuart dan Sundeen. (1998). Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3 alih bahasa Achir Yani. S. Jakarta: EGC.

⁵ Ibid.

penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

a. Jumlah Kasus Kekerasan

Jumlah kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai 204 kasus. Meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang setiap tahunnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap tindak kejadian kekerasan yang dialami maupun diketahui telah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, bahwa saat ini dengan dilakukannya pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPPA) di masing-masing kelurahan dapat mengidentifikasi jumlah kekerasan yang terjadi di tingkat bawah. Perlu digarisbawahi bahwa data kekerasan disebutkan diatas merupakan data kekerasan yang tercatat saja; itupun hanya yang melapor dan ditangani oleh PPT Seruni Kota Semarang beserta jajarannya dan belum termasuk yang berada di tingkat masyarakat dan yang tidak dilaporkan dengan berbagai macam alasan.

b. Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Usia Korban

Kasus kekerasan yang saat ini sedang menjadi trend di Kota Semarang saat ini adalah masalah kekerasan psikis dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana sebagian besar korban berusia anak. Jumlah kekerasan terhadap orang anak pada tahun 2018 mencapai 271 kasus, yaitu sebanyak 188 terjadi kepada perempuan sedangkan 83 kasus lainnya terjadi kepada laki-laki. Jumlah kekerasan terhadap orang dewasa di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai 208 kasus, yaitu sebanyak 27 kasus terjadi kepada laki-laki dan 181 kasus terjadi kepada anak perempuan. Jumlah kekerasan berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Usia Korban di Kota Semarang Tahun 2016-2018

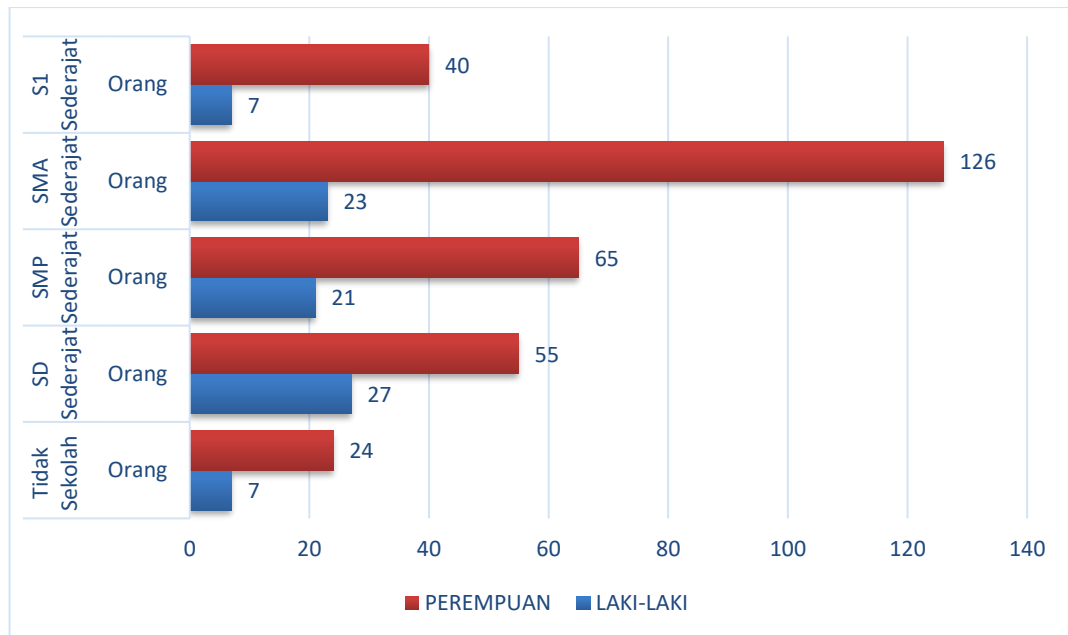
URUSAN DAN INDIKATOR	SATUAN	2016			2017			2018		
		L	K	Jml	L	K	Jml	L	K	Jml

URUSAN DAN INDIKATOR	SATUAN	2016			2017			2018		
		L	K	Jml	L	K	Jml	L	K	Jml
Jumlah Korban Kekerasan Anak (Usia Kurang Dari 18 Tahun)	Orang	24	69	93	58	87	145	72	132	204
Jumlah Korban Kekerasan Ramaja (Usia 18-25 Tahun)	Orang	2	28	30	1	44	45	11	56	67
Jumlah Korban Kekerasan Desawa (Usia 25 Tahun ke Atas)	Orang	3	98	101	5	198	203	27	181	208
Jumlah		29	195	224	64	329	393	110	369	479

Sumber : Data DP3A tahun 2019, diolah

c. Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah korban kekerasan di Kota Semarang sebagian berpendidikan SMA sederajat yaitu sebanyak 149 korban, disusul kemudian berpendidikan SMP sebanyak 86 korban dan berpendidikan SD sebanyak 82 korban. Hanya sebagian kecil korban yang berpendidikan sebagai sarjana dan tidak sekolah, yaitu masing-masing sebanyak 47 orang dan 31 orang. Dari masing-masing jenjang pendidikan, sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan. Jumlah korban perempuan pada jenjang pendidikan SMA mencapai 126 orang, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP mencapai 65 orang dan pada jenjang pendidikan SD mencapai 55 orang. Secara rinci jumlah korban kekerasan di Kota Semarang berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik yang tersaji di bawah ini.

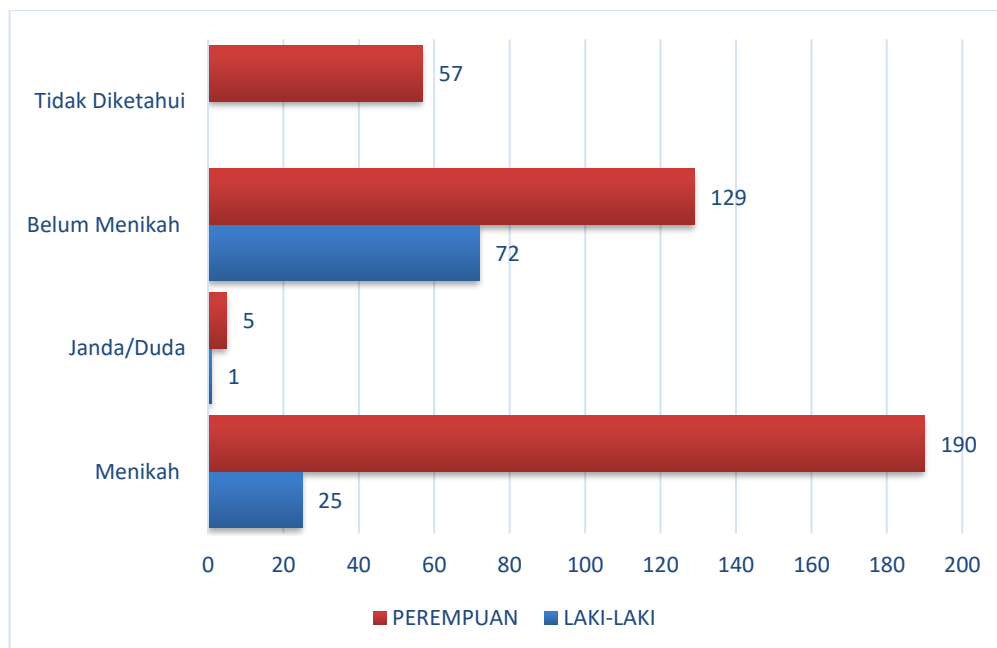


Sumber : Data DP3A tahun 2019, diolah

Gambar 4.49 Jumlah Korban Kekerasan di Kota Semarang menurut Tingkatan Umur Tahun 2014

d. Status Pernikahan Korban

Dari sebanyak 479 data korban yang diterima, sebagian besar korban kekerasan berstatus menikah yaitu sebanyak 215 orang. Adapun korban yang berstatus belum menikah mencapai 201 orang dan sisanya tidak diketahui sebanyak 57 orang dan janda/duda sebanyak 6 orang. Jumlah korban menurut status pernikahan secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

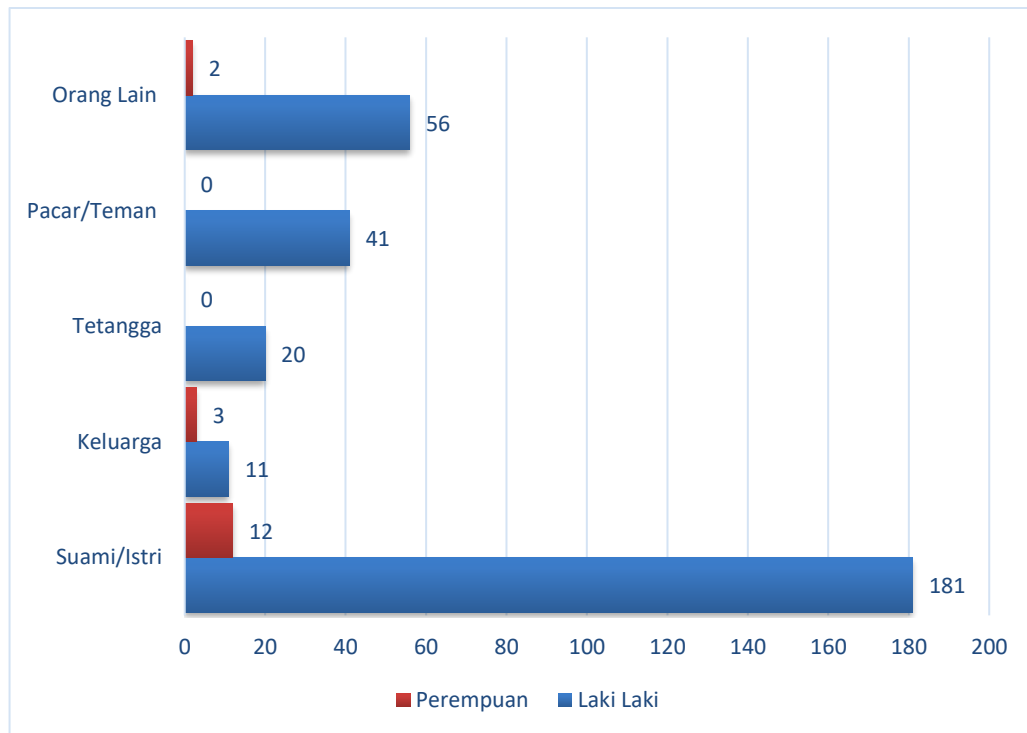


Sumber : Data DP3A tahun 2019, diolah

Gambar 4.50 Jumlah Korban kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Status Pernikahan Tahun 2019

e. Hubungan Korban dengan Pelaku

Sebagian besar pelaku merupakan orang dekat dari korban kekerasan, mengingat jumlah pelaku yang merupakan suami/istri dari korban mencapai 193 orang; terdiri dari 181 suami dan 12 istri. Jumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal mencapa 58 kasus, dimana pelaku laki-laki sebanyak 56 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Orang tua kini patut untuk merasa khawatir mengingat jumlah pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar juga dilakukan oleh pacar/teman dekat. Jumlah pacar yang menjadi pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki mencapai 41 orang. Jumlah pelaku menurut hubungan dengan korban secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data DP3A tahun 2019, diolah

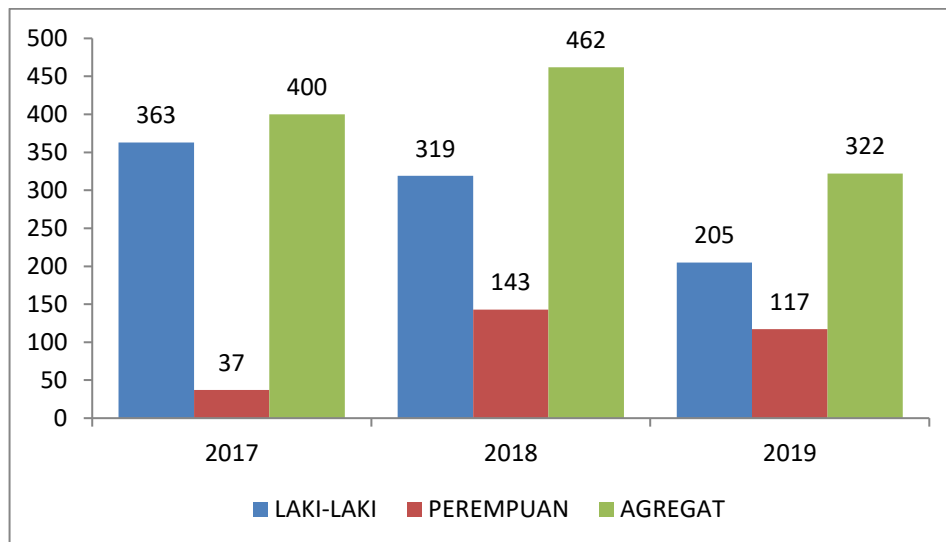
Gambar 4.51 Jumlah Pelaku kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Hubungan dengan Korban Tahun 2019

7. Rumah Tidak Layak Huni

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni. Pemberian bantuan pembangunan RTLH berbentuk stimulan atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

adalah bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Terdapat 3 mekanisme pendanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan BSPS, yaitu pendanaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.

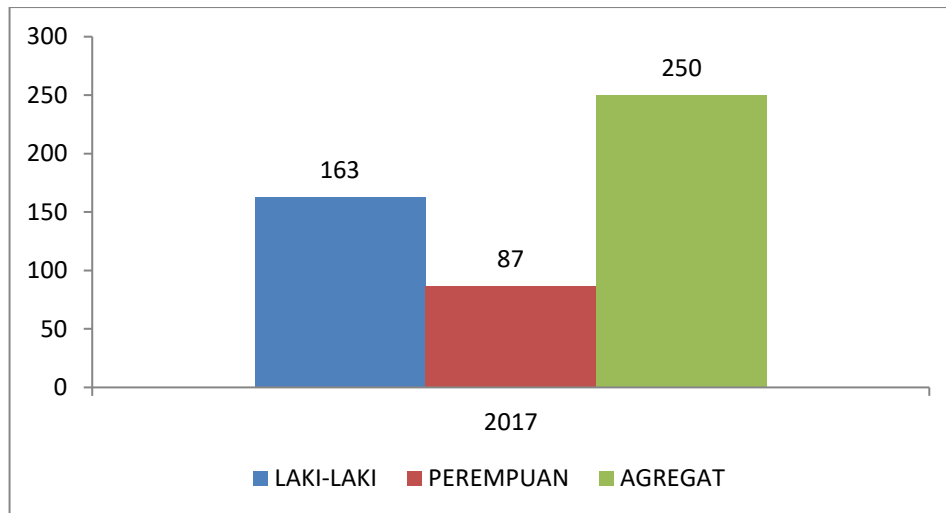
Jumlah MBR yang mendapatkan BSPS di Kota Semarang yang berasal dari APBN pada tahun 2018 berjumlah 462 KK. Terdiri dari 319 KK laki-laki dan 143 KK perempuan. Jumlah perempuan penerima BSPS pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2017 yang hanya mencapai 37 KK. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penentuan penerima manfaat BSPS di Kota Semarang telah memperhatikan kelompok rentan, yaitu salah satunya adalah KK perempuan yang memiliki pendapatan rendah.



Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019, diolah

Gambar 4.52 Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran RTLH Melalui APBN di Kota Semarang Tahun 2017-2019

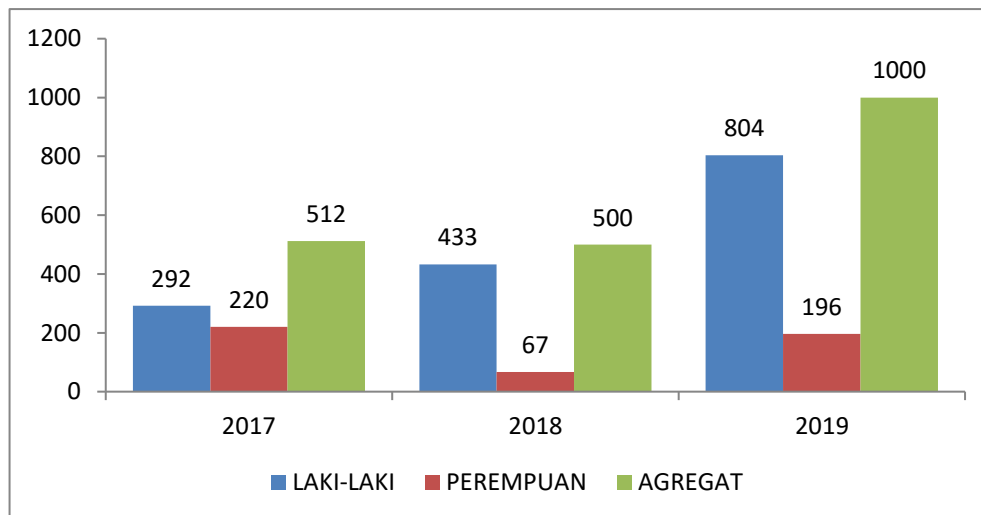
Pemerintah Kota Semarang juga mendapatkan pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 250 MBR yang telah mendapatkan bantuan stimulan BSPS, yaitu sebanyak 163 KK laki-laki dan 87 KK perempuan.



Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019, diolah Data Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, diolah

Gambar 4.53 Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran RTLH Melalui APB Provinsi di Kota Semarang Tahun 2017-2019

Pemerintah Kota Semarang juga menyediakan alokasi anggaran setiap tahunnya untuk memberikan bantuan BSPS kepada MBR yang belum ter-cover oleh pendanaan APBN dan APBD Provinsi. Jumlah penerima bantuan BSPS di Kota Semarang pada tahun 2019 meningkat 100% dibandingkan tahun 2018. Terdapat 1.000 MBR yang mendapatkan bantuan dan dengan alokasi sebanyak 804 KK laki-laki dan 196 KK perempuan.



Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019, diolah

Gambar 4.54 Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran RTLH Melalui APB Kab/Kota di Kota Semarang Tahun 2017-2019

BAB V
PERMASALAHAN GENDER
PADA MASING-MASING BIDANG PEMBANGUNAN

F. Bidang Kesehatan

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu mencapai **19 kasus** atau 75,57 per 100.000 KH
2. Tingginya kasus HIV AIDS pada perempuan (65,80%) dan anak (50,25).

G. Bidang Pendidikan

1. Belum optimalnya partisipasi sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP yaitu sebesar 80,51% untuk laki-laki dan 73,90% untuk perempuan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian APK yang sudah mencapai 116,23% (120,39% laki-laki dan 112,07% perempuan) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang diberikan di Kota Semarang sebanyak 20% nya dinikmati oleh penduduk bukan warga Semarang.
2. Masih adanya anak sekolah di tingkat SD dan SMP yang mengalami putus sekolah.
3. Menurunnya minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, maupun C, utamanya dari kelompok perempuan.

H. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Masih belum terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja yang memadai dari pencaker di Kota Semarang, terlihat dari sebagian besar pencaker berpendidikan SMA dengan jumlah terbesar adalah perempuan sebanyak 6.143 orang. Kondisi ini akan menempatkan posisi pencaker dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena harus bersaing dengan pencaker dengan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terlihat dari capaian TPAK perempuan yang baru mencapai 46,30% atau dapat dikatakan hampir lebih dari 53% angkatan kerja di Semarang masih belum bekerja.

3. Tingginya jumlah pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri, karena memiliki potensi kerentanan yang tinggi terhadap berbagai tindak kejahatan. Jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri pada tahun 2018 mencapai 149 orang.
4. Tingginya jumlah pedagang pasar perempuan di Kota Semarang mencapai 16.007 menjadikan posisi mereka rawan terkait dengan pemenuhan haknya.

I. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
2. Masih rendahnya kompetensi PNS perempuan dibandingkan dengan PNS laki-laki kendati tingkat pendidikan PNS perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

J. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

1. Masih tingginya ketimpangan antara jumlah polisi laki-laki dan polisi perempuan.
2. Tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang, utamanya dari jenis kelamin laki-laki.
3. Tingginya jumlah korban bencana alam di Kota Semarang, utamanya dari kalangan perempuan yang mencapai 3.700 jiwa dari total korban mencapai 5.700 jiwa.
4. Tingginya angka kekerasan yang terjadi kepada ibu dan anak di Kota Semarang, yang disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan dalam berpacaran sebanyak 41 anak perempuan.
 - b. KDRT 193 kasus, terdiri dari 181 korban perempuan dan 12 korban laki-laki, serta
 - c. Kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat yaitu keluarga dan tetangga yang sebagian besar terjadi kepada perempuan yaitu sebesar 31 kasus.

BAB VI P E N U T U P

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. **Profil Gender** merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang sesuai dengan **amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009** tentang Penyelenggaraan Data Gender. Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka Data Pilah Gender disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta merupakan data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Semarang.

Profil Data Pilah Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya. Dalam penyusunan Profil Data Pilah Gender Kota Semarang diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD untuk menyerahkan dan mengisi data sesuai dengan kuesioner secara benar dan dapat dipercaya.

Profil Gender Kota Semarang Tahun 2019 dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.